



Gotong Royong
Membangun *Rumah*
untuk Rakyat

LAKIP 2025

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk spertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan ini memuat capaian kinerja program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, termasuk realisasi anggaran, tingkat pencapaian indikator kinerja, serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Capaian tersebut merupakan hasil kerja dan sinergi seluruh jajaran Balai dalam mendukung penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.



Banda Aceh, 28 Februari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera I



Iswanto, S.T., M.Si.

NIP. 19711106 199703 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Tujuan dan Sasaran

Merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, kementerian melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS-1), yaitu *“Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”*, serta Sasaran Strategis 2 (SS-2), yaitu *“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. BP3KP Sumatera I sebagai Balai P3KP Kelas II bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset.

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, BP3KP Sumatera I secara umum bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya penyediaan perumahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak.

B. Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I melaksanakan kegiatan dengan output sebagai capaian terhadap dua sasaran kegiatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu *“Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”* dan *“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”*.



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan kegiatan mencakup seluruh wilayah di provinsi Aceh.

Tabel Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
SK. 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni			
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 laporan	1 laporan	100
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	100
SK. 2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah kawasan permukiman			
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	100
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1001 Unit	994 Unit	99,3
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
SK. 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan			
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100
SK. 2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan			



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan	2 Laporan	100
2	Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Wilayah Perdesaan	1048 Unit	1047 Unit	99,9
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN				
SK. 1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100
SK. 2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
2	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	64 Unit	64 Unit	100
SK. 3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	553 Unit	553 Unit	100
SEKRETARIAT JENDERAL				
SK. 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen			
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	2 Layanan	2 Layanan	100
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO				
SK. 1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efektif dan Akuntabel			
1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100



Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
SK. 2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Jumlah Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I memiliki 17 indikator kinerja yang merupakan gabungan dari indikator kinerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Capaian kinerja kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I yaitu sebesar 99,95% merupakan rata capaian dari 15 indikator kinerja sesuai target (100%) dan 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai 100% target (<100%).

Indikator yang tidak tercapai maksimal yaitu pada pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Aceh (8 unit). Tidak tercapainya kegiatan tersebut secara maksimal disebabkan beberapa kendala yang menyebabkan pekerjaan tidak mungkin untuk dilanjutkan karena adanya bencana hidrometeorologi dan pembatalan/pengunduran diri calon penerima bantuan.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 merupakan anggaran gabungan dari DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I mengelola 9 (Sembilan) DIPA dengan 5 (lima) DIPA dikelola langsung pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dan 4 (empat) DIPA dikelola Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh. Realisasi anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025

Satuan Kerja		Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	3.634.199.000	3.563.047.677	98,04
2	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh	74,132,692,000	73,602,077,398	99.28
Total		77.766.891.000	77.165.125.075	98,66

D. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam memenuhi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2025, terdapat faktor keberhasilan dan kendala atau permasalahan yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dalam pelaksanaan pengawasan dan manajemen kegiatan selama Tahun anggaran 2025 yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Adanya peran aktif dan komitmen antara pimpinan dan staf untuk mencapai target kegiatan 1 (satu) tahun;
2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah, perbankan dan CSR untuk mensukseskan target program 3 juta rumah;
3. Adanya identifikasi dan mitigasi risiko yang dilakukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I untuk memetakan potensi dan hambatan pelaksanaan kegiatan;
4. Adanya perencanaan yang tepat sasaran;
5. Adanya pembinaan dan koordinasi yang baik antara Kementerian Pusat dengan Balai dan Satuan Kerja sehingga realisasi dapat tercapai sesuai target.

b. Faktor Penyebab Kegagalan

1. Perubahan arah kebijakan dan program kegiatan baru yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan target realisasi program;
2. Alokasi anggaran baru tersedia pada semester 2 (dua) tahun anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program;



3. Penyesuaian terhadap peraturan dan pedoman baru dalam lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Keterlambatan pelaksanaan program pembangunan baru yang dimulai pada semester 2 karena adanya transisi perubahan Kementerian;
5. Pengusulan bantuan yang masih menggunakan metode *top down* sehingga instansi pengusul tidak dapat memaksimalkan usulan sesuai dengan kebutuhan;
6. Pemahaman calon penerima bantuan masih terbatas;
7. Terdapat kondisi *force majeure* berupa bencana alam hidrometeorologi siklon senyar di Provinsi Aceh yang berdampak pada progres fisik pekerjaan di Balai.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
1.3.1. Struktur Organisasi	4
1.3.2. Sumber Daya Manusia	7
1.4. Sarana dan Prasarana	13
1.5. Isu Strategis	15
1.6. Sistematika Laporan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Rencana Strategis.....	19
2.2. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja.....	23
2.2.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal.....	23
2.2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	24
2.2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	26
2.2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	29
2.2.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	31
2.3. Metode Pengukuran Kinerja	32
2.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	33
2.4.1. DIPA Sekretariat Jenderal	33
2.4.2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	34
2.4.3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	35
2.4.4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	35
2.4.5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	38
3.2. Capaian Kinerja	40



3.2.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Layanan Dukungan Manajemen	43
3.2.2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	44
3.2.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan dan Swadaya (BSPS)	51
3.2.4. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun	66
3.2.5. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	73
3.2.6. Capaian Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko	89
3.3. Analisis Perbandingan Kinerja	94
3.3.1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	94
3.3.2. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029	98
3.4. Analisis Realisasi Anggaran	100
3.4.1. Realisasi Pelaksanaan Anggaran BP3KP Sumatera I	101
3.4.2. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Satker PKP Prov. Aceh	105
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	107
3.6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan	110
BAB IV PENUTUP	113
4.1. Kesimpulan	113
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	113



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Komposisi pegawai BP3KP Sum I berdasarkan pangkat dan golongan ...	8
Tabel 1. 2. Pegawai Balai P3KP Sumatera I	10
Tabel 1. 3. Pegawai Satker PKP Prov Aceh	11
Tabel 1. 4. Sarana dan Prasarana BP3KP Sum I	14
Tabel 1. 5. Sarana dan Prasarana Satker PKP Prov Aceh	14
Tabel 1. 6. Pemanfaatan Media BP3KP Sum I	15
Tabel 2. 1. Sasaran Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029	21
Tabel 2. 2. Target Indikator Kinerja BP3KP Sum I Tahun 2025	21
Tabel 2. 3. Skala ordinal perhitungan pencapaian kinerja	32
Tabel 2. 4. Rekapitulasi DIPA Awal Satuan Kerja Wilayah Sumatera I	33
Tabel 2. 5. Rekapitulasi DIPA Akhir Satuan Kerja Wilayah Sumatera I	33
Tabel 2. 6. Kronologi Revisi DIPA Sekretariat Jenderal TA 2025	34
Tabel 2. 7. Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA 2025	34
Tabel 2. 8. Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA 2025	35
Tabel 2. 9. Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025	36
Tabel 2. 10. Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	36
Tabel 3. 1. Hasil evaluasi implementasi AKIP BP3KP Sumatera I Tahun 2023	38
Tabel 3. 2. Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2023	38
Tabel 3. 3. Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	40
Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Layanan Dukungan Manajemen BP3KP Sumatera I	43
Tabel 3. 5. Capaian Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025	44
Tabel 3. 6. Capaian Layanan Klinik PKP BP3KP Sumatera I TA 2025	48
Tabel 3. 7. Rencana dan Realisasi Kegiatan BSPS Delineasi Perdesaan TA 2025 ..	54
Tabel 3. 8. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan BSPS delineasi perdesaan TA 2025	54



Tabel 3. 9. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan BSPS delineasi perkotaan TA 2025	59
Tabel 3. 10. Rencana dan Realisasi Kegiatan BSPS Delineasi Perkotaan TA 2025	59
Tabel 3. 11. Rencana dan Realisasi Kegiatan BSPS Delineasi Pesisir TA 2025.....	62
Tabel 3. 12. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan BSPS delineasi pesisir TA 2025	63
Tabel 3. 13. Realisasi Pertriwulan Pembangunan Rusun Pondok Pesantren Yayasan Waqaf Quran Haroen Ali Kuta Malaka Dayah Darul Quran Aceh (DQA)	67
Tabel 3. 14. Ringkasan Data Umum, Kontrak, dan Perubahan Addendum Kegiatan Rusun DQA	67
Tabel 3. 15. Ringkasan Data Kontrak dan Perubahan (Addendum) Konsultan Manajemen Rusun DQA.....	68
Tabel 3. 16. Ringkasan Data Umum, Kontrak, dan Perubahan Addendum Kegiatan Rusun Pondok Pesantren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima	70
Tabel 3. 17. Ringkasan Data Kontrak dan Perubahan (Addendum) Konsultan Manajemen Rusun Pondok Pesantren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima.....	71
Tabel 3. 18. Matriks sebelum dan sesudah pembangunan ZI	75
Tabel 3. 19. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area manajemen perubahan	79
Tabel 3. 20. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area penguatan tata laksana	80
Tabel 3. 21. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area manajemen SDM ...	82
Tabel 3. 22. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	83
Tabel 3. 23. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area penguatan pengawasan	84
Tabel 3. 24. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area peningkatan pelayanan publik.....	88
Tabel 3. 25. Rincian pernyataan profil risiko dan profil risiko korupsi BP3KP Sumatera I	91
Tabel 3. 26. kategori dan sub kategori risiko.....	91
Tabel 3. 27. Data level risiko	92
Tabel 3. 28. Pernyataan risiko dan rencana inovasi pengendalian risiko.....	92
Tabel 3. 29. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya	94



Tabel 3. 30. Capaian kinerja terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.....	98
Tabel 3. 31. Realisasi 31 Desember 2025 keseluruhan DIPA TA 2025	101
Tabel 3. 32. Realisasi 31 Desember 2025 DIPA Sekretariat Jenderal TA 2025	101
Tabel 3. 33. Realisasi 31 Desember 2025 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA 2025	102
Tabel 3. 34. Realisasi 31 Desember 2025 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA 2025	103
Tabel 3. 35. Realisasi 31 Desember 2025 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025	103
Tabel 3. 36. Realisasi 31 Desember 2025 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025	104
Tabel 3. 37. Realisasi Satker PKP Provinsi Aceh	105
Tabel 3. 38. Detail Realisasi Satker PKP Provinsi Aceh	105
Tabel 3. 39. Efisiensi BP3KP Sumatera I	108
Tabel 3. 40. Efisiensi Satker PKP Prov Aceh	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Balai P3KP Sumatera I.....	6
Gambar 1. 2. Jumlah pegawai BP3KP Sum I berdasarkan status kepegawaian.....	7
Gambar 1. 3. Komposisi pegawai BP3KP Sum I berdasarkan jabatan	9
Gambar 1. 4. Komposisi pegawai BP3KP Sum I berdasarkan pendidikan	9
Gambar 1. 5. Kantor BP3KP Sumatera I dan Satker PKP Prov Aceh.....	13
Gambar 2. 1. Arah kebijakan Presiden terkait perumahan untuk dilaksanakan Kementerian PKP	20
Gambar 2. 2. PK Awal Sekretariat Jenderal	24
Gambar 2. 3. PK Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	25
Gambar 2. 4. PK Akhir Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	26
Gambar 2. 5. PK Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	27
Gambar 2. 6. PK Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	28
Gambar 2. 7. PK Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	29
Gambar 2. 8. PK Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	30
Gambar 2. 9. PK Awal Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	31
Gambar 3. 1. Laporan Akhir 2025 Pelaksanaan Layanan Dukungan Manajemen BP3KP Sumatera I	43
Gambar 3. 2. Laporan Akhir 2025 Klinik PKP BP3KP Sumatera I	45
Gambar 3. 3. Ruang Klinik PKP BP3KP Sumatera I.....	45
Gambar 3. 4. Leaflet dan Banner Klinik PKP BP3KP Sumatera I	46
Gambar 3. 5. Unggahan Infografis dan Videografis Klinik PKP di Instagram BP3KP Sumatera I	47
Gambar 3. 6. Sosialisasi dan Layanan Klinik PKP BP3KP Sumatera I.....	49
Gambar 3. 7. Pelaksanaan sosialisasi dan pembagian brosur Klinik PKP dalam kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi program padat karya BJKW I Banda Aceh	50
Gambar 3. 8. Sebaran penyaluran BSPS di Provinsi Aceh	51
Gambar 3. 9. PKS Satker dan Bank/Pos Penyalur	52
Gambar 3. 10. Dokumentasi kegiatan verifikasi BSPS (a) verifikasi perdesaan (b) verifikasi perkotaan (c) verifikasi pesisir	52



Gambar 3. 11. Dokumentasi kegiatan pembentukan KPB (a) pembentukan KPB perdesaan (b) pembentukan KPB perkotaan (c) pembentukan KPB pesisir	52
Gambar 3. 12. Dokumentasi kegiatan pemilihan toko terbuka (a) PTT perdesaan (b) PTT perkotaan (c) PTT pesisir	53
Gambar 3. 13. Peta Sebaran pelaksanaa BSPS Delineasi Perdesaan	53
Gambar 3. 14. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Besar	55
Gambar 3. 15. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Utara	55
Gambar 3. 16. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Tamiang	56
Gambar 3. 17. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Tenggara	56
Gambar 3. 18. Pelaksanaan BSPS di Kab. Gayo Lues	56
Gambar 3. 19. Pelaksanaan BSPS di Kab. Bener Meriah	57
Gambar 3. 20. Kondisi pasca bencana hidrometeorologi pada delineasi perdesaan	57
Gambar 3. 21. Peta Sebaran pelaksanaa BSPS Delineasi Perkotaan	58
Gambar 3. 22. Pelaksanaan BSPS di Kota Lhokseumawe	60
Gambar 3. 23. Pelaksanaan BSPS di Kota Langsa	60
Gambar 3. 24. Pelaksanaan BSPS di Kota Subulussalam	61
Gambar 3. 25. Peta Sebaran pelaksanaa BSPS Delineasi Perdesaan	61
Gambar 3. 26. Pelaksanaan BSPS di Kab. Pidie Jaya	63
Gambar 3. 27. Pelaksanaan BSPS di Kab. Bireuen	64
Gambar 3. 28. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Timur	64
Gambar 3. 29. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Jaya	64
Gambar 3. 30. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Selatan	65
Gambar 3. 31. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Singkil	65
Gambar 3. 32. Kondisi pasca bencana hidrometeorologi pada delineasi pesisir	65
Gambar 3. 33. Peta sebaran pembangunan rusun BP3KP Sum I	66
Gambar 3. 34. Pembangunan Rusun Pondok Pesantren Yayasan Wakaf Quran Haroen Ali Kuta Malaka Dayah Darul Quran Aceh (DQA)	69
Gambar 3. 35. Kondisi Rusun Pondok Pesantren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima sebelum bencana	72
Gambar 3. 36. Kondisi Rusun Pondok Pesantren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima setelah bencana	73



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas dan Fungsi
- Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Sarana dan Prasarana
- Isu Strategis
- Sistematika Laporan

2025





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pemanfaatan sumber daya dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan teknis yang berlaku di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, laporan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan bahwa implementasi SAKIP dilaksanakan secara berjenjang oleh seluruh entitas, mulai dari pimpinan Satuan Kerja, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Kerja, Unit Organisasi, hingga tingkat Kementerian, berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Laporan kinerja ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang meliputi tahapan perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pemantauan dan evaluasi capaian kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sendiri merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan sistematis, terdiri atas berbagai aktivitas, instrumen, serta prosedur yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur kinerja, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban sekaligus upaya peningkatan kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor



15 Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, dalam rangka mendukung pencapaian misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas dan Fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan wilayah kerjanya. Dalam menjalankan perannya, Balai memiliki tugas dan fungsi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun uraian tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I adalah sebagai berikut:

TUGAS:

Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

FUNGSI:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;



5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi dan sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I. Pengaturan organisasi yang jelas serta dukungan pegawai yang kompeten menjadi faktor penentu dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



1.3.1. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan Wilayah, dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh.

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, serta administrasi sumber daya manusia. Selain itu, subbagian ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi serta pembangunan zona integritas, pengoordinasian administrasi dalam penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, pelaksanaan komunikasi publik, serta penyediaan layanan hukum balai.

2. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta penataan kawasan pasca bencana dan kerusakan sosial. Seksi ini juga melaksanakan koordinasi penyediaan lahan, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta verifikasi data sesuai delineasi wilayah yang ditetapkan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I didukung oleh dua Seksi Pelaksanaan Wilayah, yaitu Wilayah I dan Wilayah II. Kedua seksi tersebut bertugas menyiapkan bahan program dan anggaran, rencana teknis, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan dan prasarana, sarana, serta utilitas umum, termasuk koordinasi penanganan pasca bencana dan penyediaan lahan sesuai wilayah kerja masing-masing.

3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II



Seksi Pelaksanaan Wilayah II memiliki tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, termasuk koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain itu, seksi ini juga bertanggung jawab atas fasilitasi penghunian, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delin-easi kawasan perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I didukung oleh satu Satuan Kerja, yaitu Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh. Satuan Kerja tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut:

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah susun dan rumah khusus.

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.

c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

PP-SPM mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran serta menerbitkan surat perintah pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan.

d. Bendahara Pengeluaran

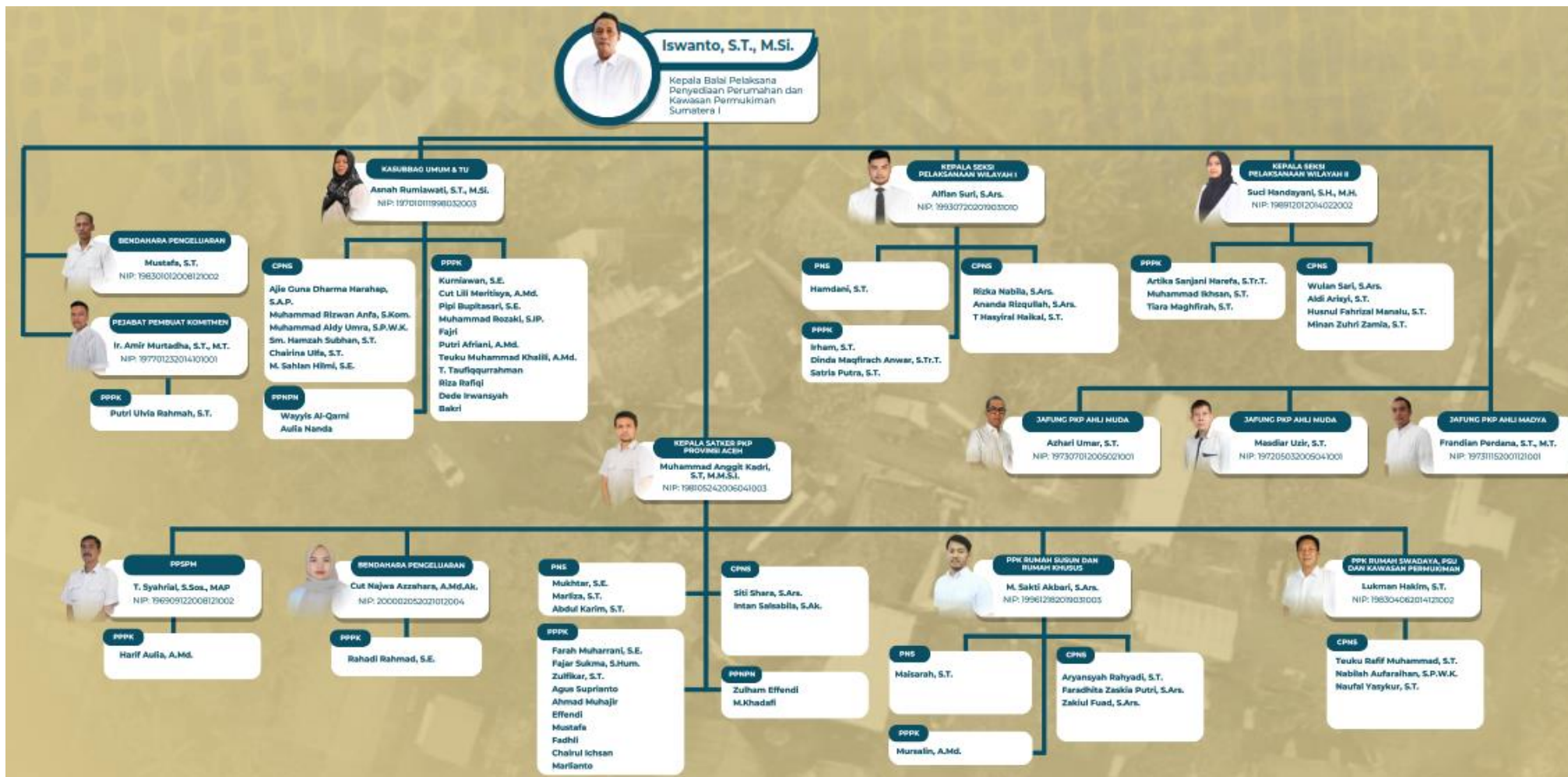
Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan negara yang bertanggung jawab melakukan pembayaran atas dana yang berada dalam pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I

Berikut merupakan Struktur Organisasi pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Balai P3KP Sumatera I

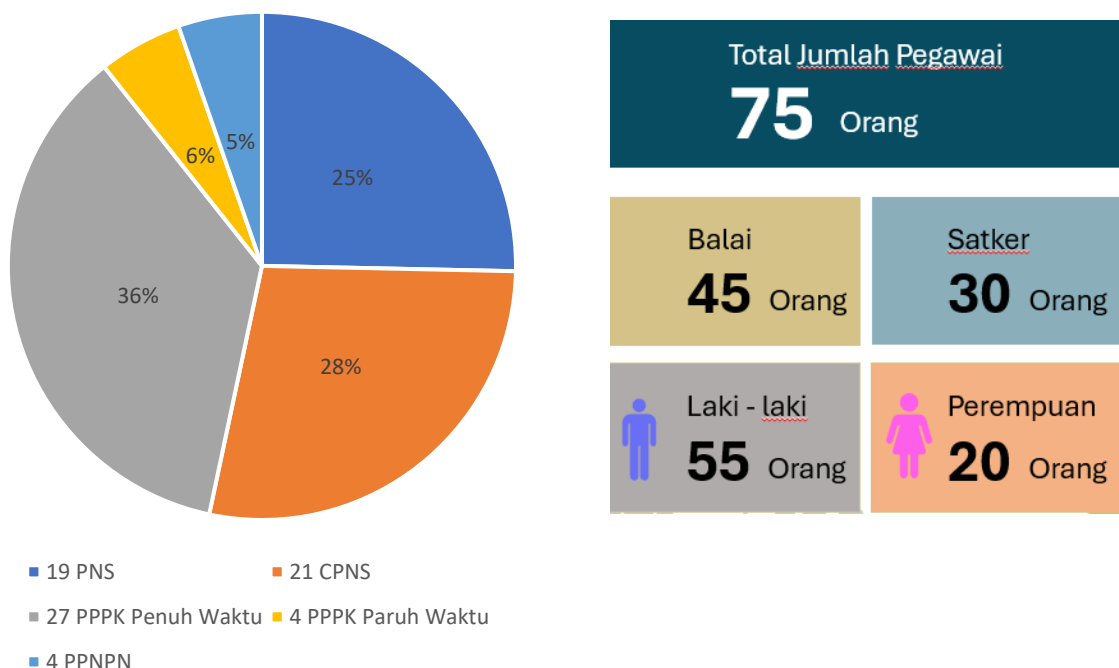


1.3.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sebuah organisasi harus didukung oleh pegawai yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, serta ditunjang oleh strategi dan tata kelola operasional yang tepat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

1.3.2.1. Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di Provinsi Aceh yaitu sejumlah 75 orang yang terdiri atas 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 27 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu, 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, 21 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 4 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Dari 75 orang pegawai, 43 orang bertugas di Balai dan 32 orang Pegawai bertugas di Satuan Kerja.



Gambar 1. 2. Jumlah pegawai BP3KP Sum I berdasarkan status kepegawaian



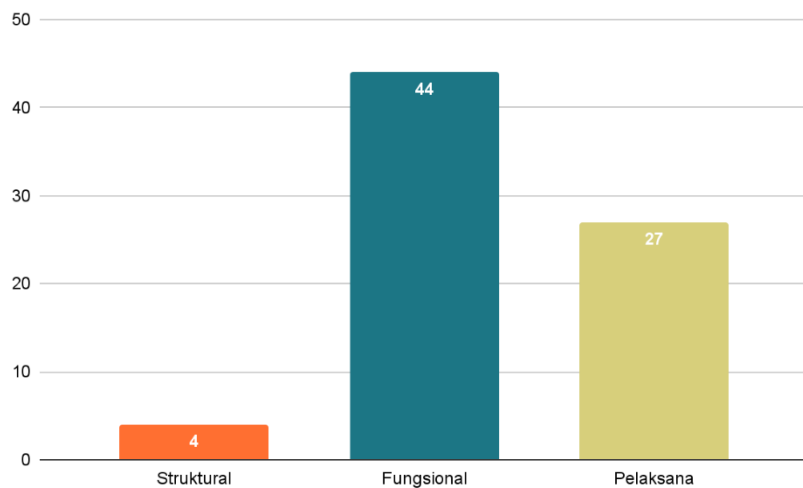
1.3.2.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Berdasarkan pangkat/golongan, pegawai pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I yang terdiri dari PNS, CPNS, dan PPPK dengan golongan berjumlah 67 orang dari total 75 orang pegawai. Komposisi tersebut didominasi oleh golongan III sebanyak 38 orang (56,72%), diikuti golongan IV sebanyak 5 orang (7,46%), dan golongan II sebanyak 2 orang (2,99%). Selain itu, pegawai dengan status PPPK tersebar pada golongan IX sebanyak 14 orang, golongan VII sebanyak 5 orang, dan golongan V sebanyak 8 orang, dengan total 27 orang (40,30%). Adapun 8 orang pegawai lainnya merupakan PPPK Paruh Waktu dan PPNP yang tidak termasuk dalam penggolongan tersebut.

Tabel 1. 1. Komposisi pegawai BP3KP Sum I berdasarkan pangkat dan golongan

Status Kepegawaian	Pangkat / Golongan		Jumlah
PNS	Pembina Tingkat I	IV/b	1
	Pembina	IV/a	4
	Penata Tingkat I	III/d	5
	Penata	III/c	2
	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
	Penata Muda	III/a	1
	Pengatur Tingkat I	II/d	2
CPNS	Penata Muda	III/a	21
PPPK	Ahli Pertama	IX	14
	Terampil	VII	5
	Pemula	V	8

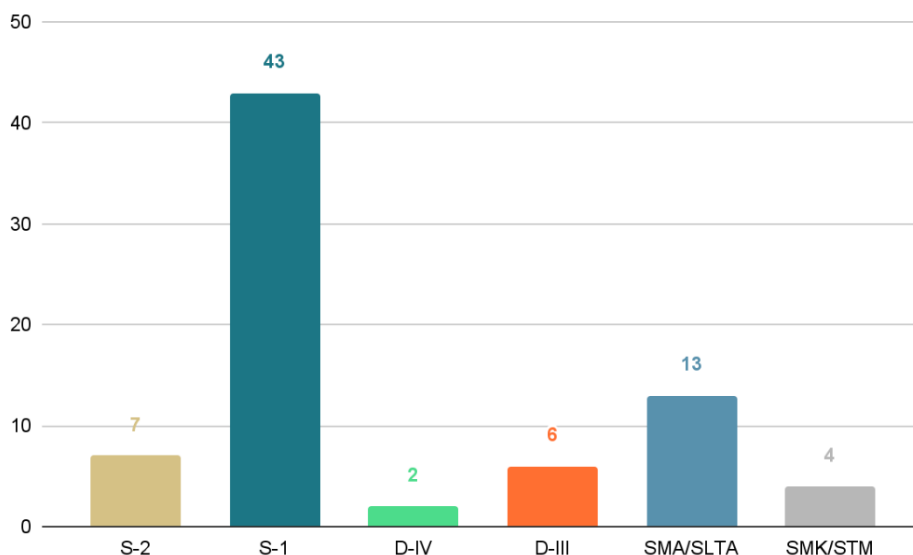
Berdasarkan kelompok jabatan, pegawai pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I terdiri dari jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Jabatan struktural berjumlah 4 orang, jabatan fungsional sebanyak 44 orang, dan jabatan pelaksana sebanyak 27 orang. Jabatan fungsional tersebut didominasi oleh Penata Kelola Perumahan serta Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman yang mendukung pelaksanaan tugas teknis organisasi.



Gambar 1. 3. Komposisi pegawai BP3KP Sum I berdasarkan jabatan

1.3.2.3. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan terakhir, pegawai pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I didominasi oleh lulusan Strata 1 (S-1) sebanyak 43 orang, dengan jurusan terbanyak Teknik Sipil dan Arsitektur. Selain itu, terdapat 7 orang lulusan S-2, 2 orang D-IV, 6 orang D-III, serta 17 orang lulusan SMA/SMK. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan sarjana yang mendukung pelaksanaan tugas teknis organisasi.



Gambar 1. 4. Komposisi pegawai BP3KP Sum I berdasarkan pendidikan



Secara keseluruhan rincian pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2. Pegawai Balai P3KP Sumatera I

No.	NAMA / NIP	JABATAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I		
1	Iswanto, ST., M.Si. 197111061997031004	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
2	Frandian Perdana, S.T., M.T. 197311152001121001	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya
3	Azhari Umar, S.T. 197307012005021001	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda
4	Masdiar Uzir, S.T. 197205032005041001	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda
SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH I		
1	Alfian Suri, S.Ars. 199307202019031010	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I
2	Hamdani, S.T. 197101012007011008	Pelaksana Teknik
3	Irham, ST 199004032023211020	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
4	Dinda Maqfirach Anwar, S.Tr.T 199708272023212024	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan
5	Satria Putra, S.T. 199709112024211003	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
6	T Hasyiral Haikal, S.T. 199503102025061007	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
7	Ananda Rizqullah, S.Ars 200203232025061004	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
8	Rizka Nabila, S.Ars 199904282025062019	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II		
1	Suci Handayani, S.H., M.H. 198912012014022002	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II
2	Muhammad Ikhsan, S.T. 198811292024211007	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
3	Tiara Maghfirah, S.T. 199912012024212008	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
4	Artika Sanjani Harefa, S.Tr.T. 199704192023212009	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
5	Wulan Sari, S.Ars. 200101122025062018	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
6	Aldi Arisyi, S.T. 200006212025061009	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
7	Minan Zuhri Zamia, S.T. 200111282025061010	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
8	Husnul Fahrizal Manalu, S.T. 200008022025061007	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA		
1	Asnah Rumiawati, S.T., M.Si. 197010111998032003	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
2	Mustafa, S.T. 198301012008121002	Bendahara Pengeluaran
3	Ir. Amir Murtadha, S.T., M.T. 197701232014101001	PPK



4	Putri Ulvia Rahmah, S.T. 199501052024212017	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
5	Kurniawan, S.E. 198604242024211002	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan
6	Cut Lili Meritisya, A.Md 198911112024212021	Terampil - Pranata Komputer
7	Pipi Bupitasari, S.E. 199112262023212040	Ahli Pertama - Arsiparis
8	Muhammad Rozaki, S.IP. 199306262025211062	Arsiparis Ahli Pertama
9	Fajri 198208242025211035	Operator Layanan Operasional
10	Putri Afriani, A.Md 199504082025212056	Penata Keuangan
11	Teuku Muhammad Khalili, A.Md 199106022025211068	Pengelola Layanan Operasional
12	Teuku Taufiqurrahman 199911012025211053	Operator Layanan Operasional
13	Riza Rafiqi PPNPN002	Operator Layanan Operasional
14	Dede Irwansyah PPNPN003	Operator Layanan Operasional
15	Bakri PPNPN004	Operator Layanan Operasional
16	Wayyis Al-Qarni PPNPN006	Outsourcing
17	Aulia Nanda PPNPN007	Outsourcing
18	Ajie Guna Dharma Harahap, S.A.P. 200103132025061014	Arsiparis Ahli Pertama
19	Muhammad Rizwan Anfa, S.Kom. 199608132025061010	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
20	Muhammad Aldy Umra, S.P.W.K. 200012122025061010	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
21	Sm. Hamzah Subhan, S.T. 200112242025061006	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
22	Chairina Ulfa, S.T. 199206132025062008	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
23	M. Sahlan Hilmi, S.E. 200102072025061004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

Tabel 1. 3. Pegawai Satker PKP Prov Aceh

No.	NAMA / NIP	JABATAN
PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN		
	Muhammad Anggit Kadri, S.T., M.M.S.I. 19810524 200604 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran
	Siti Shara, S. Ars 19970305 202506 2 011	Pelaksana Teknis Perencanaan
	Farah Muharrani, S.E. 19950622 202321 2 040	Arsiparis
	Chairul Ihsan 19900317 202521 1 050	Operator Layanan Operasional



PELAKSANA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG		
	Muhammad Anggit Kadri, S.T., M.M.S.I. 19810524 200604 1 003	Penanggung Jawab UAKPB
	Marliza, S.T. 19760616 201001 2 003	Penelaah BMN
	Zulfikar, S.T. 19900807 202521 1 064	Petugas / Operator E-mon dan RKAKL
	Fajar Sukma, S.Hum. 19900608 202521 1 061	Petugas / Operator SIMAK BMN
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	Abdul Karim, S.T. 19750606 200904 1 002	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
	T. Syahrial, S.Sos, M.AP 19690912 200812 1 002	PPSPM
	Mukhtar, S.E. 19680903 200701 1 002	Pengelola Keuangan
	Harif Aulia, A.Md. 19941114 202521 1 047	Pengelola Layanan Operasional
BENDAHARA PENGELUARAN		
	Cut Najwa Azzahara, A.Md.A.K. 20000205 202101 2 004	Bendahara Pengeluaran
	Intan Salsabila, S.Ak 20010306 202506 2 007	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
	Rahadi Rahmad, S.E. 19800806 202521 1 046	Penelaah Keuangan
PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS		
	M. Sakti Akbari, S.Ars 19961218 201903 1 003	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus
	Maisarah, S.T. 19920816 202203 2 006	Pelaksana Teknis Perencanaan
	Naufal Yasykur, S.T. 19990619 202506 1 007	Pelaksana Teknis Perencanaan
	Aryansyah Rahyadi, S.T. 19930515 202506 1 006	Pelaksana Teknis Perencanaan
	Faradhita Zaskia Putri, S.Ars 20011007 202506 2 016	Pelaksana Teknis Perencanaan
	Mursalin, A.Md 19900124 202521 1 046	Pengelola Layanan Operasional
	Fadhli 19820623 202521 1 040	Operator Layanan Operasional
PPK RUMAH SWADAYA		
	Lukman Hakim, S.T. 19830406 201412 1 002	PPK Rumah Swadaya
	Nabilah Aufaraihan, S.P.W.K. 20020714 2025062 012	Pelaksana Teknis Perencanaan
	Zakiul Fuad, S.Ars. 20010216 202506 1 009	Pelaksana Teknis Perencanaan
	Teuku Rafif Muhammad, S.T. 20010817 202506 1 012	Pelaksana Teknis Perencanaan
	Marlianto 19800110 202521 1 040	Operator Layanan Operasional
PEGAWAI PENDUKUNG SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI ACEH		
	Ahmad Muhajir 19880414 202521 1 065	Staf Pendukung



	Effendi 19720203 202521 1 014	Staf Pendukung
	Mustafa 19741002 202521 1 018	Staf Pendukung
	Agus Suprianto 19950810 202521 1 066	Staf Pendukung
	Zulham Effendi	Staf Pendukung
	Khadafi	Staf Pendukung

1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I berperan dalam meningkatkan produktivitas guna mencapai kinerja yang optimal. Dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I pada tahun 2025, para pegawai didukung oleh berbagai fasilitas perkantoran serta pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Sarana utama yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I adalah gedung kantor balai yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 32, Kecamatan Lamteumen Timur, Kota Banda Aceh, yang saat ini berstatus sewa dan dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan administrasi, koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan teknis.



Gambar 1. 5. Kantor BP3KP Sumatera I dan Satker PKP Prov Aceh

Selain itu, kegiatan operasional juga didukung oleh kantor Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh yang berlokasi di Jl. Fatahillah No. 8, Gampong Geu-



ceu Iniem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, yang juga berstatus sewa, sehingga keberadaan kedua kantor tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selain gedung kantor juga didukung oleh berbagai Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Rincian BMN pada balai dan satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 4. Sarana dan Prasarana BP3KP Sum I

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	KUANTITAS	NILAI (RP)
PERALATAN DAN MESIN				
1	Lemari Besi/Metal	Buah	2	7.994.000
2	Lemari Kayu	Buah	4	6.499.000
3	Rak Kayu	Buah	2	4.798.000
4	Filing Cabinet Besi	Buah	23	23.000.000
5	Brankas	Buah	1	9.629.000
6	CCTV	Buah	9	16.909.000
7	White Board	Buah	1	2.300.000
8	Wastafel Portable	Unit	1	1.898.000
9	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	6	20.066.000
10	Meja Kerja Kayu	Buah	45	81.097.000
11	Kursi Besi/Metal	Buah	93	99.693.000
12	Kursi Kayu	Buah	9	14.992.000
13	Meja Rapat	Buah	3	14.136.000
14	Meja Resepsionis	Buah	1	5.144.000
15	Sofa	Set	2	11.277.000
16	Televisi	Buah	3	24.250.000
17	Uninterruptable Power Supply (UPS)	Buah	1	3.500.000
18	Video Wall	Unit	1	94.700.000
19	GPS Receiver	Buah	1	10.800.000
20	Telepon Digital	Buah	1	4.599.000
21	P.C. Unit	Buah	5	59.050.000
22	Lap Top	Buah	13	250.987.144
23	Printer	Buah	9	41.515.000
24	scanner	Buah	1	5.599.999
SOFTWARE				
25	Software Komputer	Dummy	1	220.000.000
TOTAL				1.030.433.343

Tabel 1. 5. Sarana dan Prasarana Satker PKP Prov Aceh

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	KUANTITAS	NILAI (RP)
PERALATAN DAN MESIN				
1	Alat Kantor	-	103	280.869.850
2	Alat Rumah Tangga	-	563	978.876.690
3	Alat Studio	-	3	25.698.352
4	Alat Komunikasi	-	1	1.485.000
5	Komputer Unit	-	26	371.956.198
6	Peralatan Komputer	-	11	57.400.000
GEDUNG DAN BANGUNAN				



7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	1	15.639.225.964
JALAN DAN JEMBATAN				
8	Jalan	-	1190	2.956.613.000
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN				
9	Alat Kantor	-	239	615.106.628
10	Alat Rumah Tangga	-	584	986.103.444
11	Alat Studio	-	1	29.800.000
12	Komputer Unit	-	9	87.175.000
13	Peralatan Komputer	-	12	21.780.000
14	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	1	12.050.910.109
TOTAL				34.103.000.235

Pada tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I melakukan pembaruan dan penataan lingkungan kantor guna mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I, baik pada tingkat balai maupun satuan kerja, berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di masing-masing unit. Selain itu, balai juga memanfaatkan serta mengembangkan berbagai media berbasis digital sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 1. 6. Pemanfaatan Media BP3KP Sum I

NO.	APLIKASI / MEDIA	KETERANGAN	ALAMAT
1	Whatsapp Klinik PKP	Media layanan Klinik PKP secara online	+62 895-3511-23652
2	Email		Bp3kp.sumatera1@pkp.go.id
3	Instagram		Bp3kp_sumatera1 Klinik_pkp_sumatera1
4	Facebook		https://www.facebook.com/share/1D1uat6Anb/?mibextid=wwXlfr

1.5. Isu Strategis

ISU STRATEGIS TAHUN 2025

1. Tingginya Backlog Kepemilikan Rumah dan RTLH

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2023, backlog kepemilikan rumah tercatat 9,9 juta unit, menurun dari 12,75



juta unit pada tahun 2020. Selain itu, terdapat sekitar 26,9 juta unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memerlukan perbaikan. Di Provinsi Aceh, backlog kepemilikan rumah mencapai 192.362 unit, sedangkan backlog RTLH sebanyak 452.315 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan perumahan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah rumah, tetapi juga kualitas hunian yang tersedia.

2. Kerentanan terhadap Bencana

Provinsi Aceh merupakan wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang. Namun, masih banyak rumah yang dibangun tanpa memperhatikan standar ketahanan bencana. Permukiman di wilayah pesisir maupun daerah rawan gempa juga sering tidak dilengkapi jalur evakuasi atau desain rumah tahan gempa, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kerugian saat terjadi bencana.

3. Urbanisasi Tidak Terkendali

Pertumbuhan kota di Aceh sering tidak sejalan dengan tata ruang, sehingga memicu munculnya permukiman tidak teratur di pinggiran kota, kawasan rawan banjir, dan wilayah dengan akses infrastruktur terbatas. Kondisi ini juga mendorong munculnya kawasan kumuh serta menambah tantangan dalam penataan kota.

4. Permasalahan Legalitas dan Sengketa Tanah

Sebagian masyarakat masih menempati lahan tanpa sertifikat atau status hukum yang jelas, sehingga sengketa tanah sering terjadi, terutama di wilayah perdesaan. Kondisi ini menghambat pengembangan perumahan formal karena keterbatasan akses terhadap program pemerintah maupun pembiayaan perbankan.



1.6. Sistematika Laporan

Sistematika laporan kinerja ini diuraikan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta isu strategis yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025. Pada bab ini juga dijelaskan sistematika penyusunan laporan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Memuat penjelasan mengenai rencana strategis balai, Perjanjian Kinerja balai, metode pengukuran kinerja yang digunakan, serta target kinerja pada tahun pelaporan dalam rangka pencapaian target Renstra.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja balai, analisis perbandingan kinerja, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya yang disertai dengan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja
- Metode Pengukuran Kinerja
- DIPA

2025





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan kawasan permukiman, yang berada dalam lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024.

Tugas utama Kementerian PKP adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi pelaksanaan tugas dan pembinaan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan internal, serta pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024, struktur organisasi Eselon I Kementerian PKP terdiri dari:

- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
- Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
- Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
- Inspektorat Jenderal
- Staf Ahli (4 bidang)

Visi Kementerian PKP adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang merupakan bagian dari arah kebijakan nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Misi kementerian ini tercermin dalam Asta Cita Presiden, khususnya:

- Asta Cita Nomor 3: Meningkatkan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur melalui pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

- Asta Cita Nomor 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, melalui penyediaan hunian layak di wilayah perdesaan.
- Asta Cita Nomor 8: Mewujudkan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan budaya melalui penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Kementerian PKP juga memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan Program Prioritas Presiden Nomor 13, yaitu “Menjamin Rumah Murah dan Sanitasi untuk Masyarakat Desa dan Rakyat yang Membutuhkan”. Program ini menekankan pentingnya hunian sebagai hak dasar warga negara dan mengamanatkan pemerintah untuk hadir dalam penyediaan rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP menjadi pelaksana utama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nomor 7, yaitu “Penyediaan rumah murah layak huni, memiliki sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk MBR seperti TNI/Polri berpangkat rendah, ASN, pegawai kementerian dan BUMN, serta pekerja informal”. Program ini merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan 3 juta rumah, yang telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025–2029.



Gambar 2. 1. Arah kebijakan Presiden terkait perumahan untuk dilaksanakan Kementerian PKP

Dengan mandat tersebut, Kementerian PKP berperan penting dalam mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.



Sesuai amanat Perpres No. 139 Tahun 2024, Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih diperkuat secara teknis oleh 19 unit BP3KP di berbagai wilayah. Khusus di wilayah Aceh, tugas penyediaan dan peningkatan kualitas hunian dilaksanakan oleh BP3KP Sumatera I bersama Satker PKP Provinsi Aceh.

Unit ini bekerja di bawah kendali Ditjen Kawasan Permukiman dengan pembinaan dari Sekjen (aspek administratif) dan Ditjen Tata Kelola (aspek kepatuhan). Fokus utama Satker PKP Aceh saat ini adalah menyukseskan Program Tiga Juta Rumah melalui dua sasaran strategis berikut:

Tabel 2. 1. Sasaran Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
SS-1	Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan	a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi; b. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu; c. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; d. Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni.
SS-2	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian	a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman c. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern

Berikut target indikator kinerja/output Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2025.

Tabel 2. 2. Target Indikator Kinerja BP3KP Sum I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
SK. 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni			
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 laporan	1 laporan	100
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	100



Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
SK. 2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah kawasan permukiman			
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	100
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1001 Unit	994 Unit	99,3
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
SK. 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan			
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100
SK. 2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan			
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan	2 Laporan	100
2	Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Wilayah Perdesaan	1048 Unit	1047 Unit	99,9
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN				
SK. 1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100
SK. 2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
2	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	64 Unit	64 Unit	100



Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
SK. 3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	553 Unit	553 Unit	100
SEKRETARIAT JENDERAL				
SK. 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen			
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	2 Layanan	2 Layanan	100
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO				
SK. 1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efektif dan Akuntabel			
1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
SK. 2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Jumlah Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100

2.2. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I memiliki Perjanjian Kinerja untuk Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Kemudian Perjanjian Kinerja ini mengalami perubahan sebanyak satu kali karena ada revisi DIPA.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua

Didyk Choiroel

NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama

Iswanto

NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	2 Layanan

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera I

Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Anggaran

Rp 1.345.015.000,00
Rp 498.219.000,00
Rp 1.843.234.000,00

Jakarta, 31 Oktober 2025

SEKRETARIS JENDERAL

Didyk Choiroel

NIP. 197104161992011001

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA I

Iswanto

NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2. 2. PK Awal Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja ini tidak mengalami perubahan atau revisi karena tidak adanya perubahan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025.

2.2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**

Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur

NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama

Iswanto

NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	994 Unit

KEGIATAN

Anggaran

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
- 2 Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Rp 510.940.000,00
Rp 22.036.368.000,00
Rp 22.547.308.000,00

Jakarta, 15 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2. 5. PK Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**

Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1001 Unit

KEGIATAN

Anggaran

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
- 2 Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Rp 510.940.000,00
Rp 22.173.714.000,00
Rp 22.684.654.000,00

Jakarta, 14 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2. 6. PK Akhir Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

2.2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Agustus 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Imran

NIP. 19731026 199302 1 001

Iswanto

NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Wilayah Perdesaan	1033 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Anggaran

Rp 187.061.000,00
Rp 22.356.700.000,00
Rp 22.543.761.000,00

Jakarta, 21 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2. 7. PK Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025 setelah revisi adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Imran

NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 24 Oktober 2025

Pihak Pertama

Iswanto

NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan
		2 Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Wilayah Perdesaan	1048 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Anggaran

Rp 321.853.000,00
Rp 22.748.555.000,00
Rp 23.070.408.000,00

Jakarta, 24 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Imran

NIP. 19731026 199302 1 001

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

Iswanto

NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2. 8. PK Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



2.2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Agustus 2025

Pihak Kedua

Sri Haryati

NIP. 19710707 199703 2 004

Pihak Pertama

Iswanto

NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	64 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	563 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Anggaran

Rp 1.051.245.000,00
Rp 28.751.654.000,00
Rp 29.802.899.000,00

Jakarta, 25 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2. 9. PK Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I

Perjanjian Kinerja akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025 setelah revisi adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua


NIP. 19710701 199703 2 004

Pihak Pertama


NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	64 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	553 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Anggaran

Rp 1.051.245.000,00
Rp 28.549.564.000,00
Rp 29.600.809.000,00

Jakarta, 17 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


NIP. 19710701 199703 2 004

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I


NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2. 12. PK Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



2.2.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Perjanjian Kinerja awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

The document is a formal agreement titled "PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025" between the Ministry of Housing and Urban Development and the Directorate General of Risk Management and Control. It outlines the performance goals for the year 2025. The agreement is signed by two parties: the "Pihak Pertama" (First Party) and the "Pihak Kedua" (Second Party). The "Pihak Pertama" is represented by Iswanto, the Director General of Risk Management and Control, and the "Pihak Kedua" is represented by Azis Andriansyah, the Head of the Directorate General of Risk Management and Control. The document includes a list of performance indicators and targets for the year 2025.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Pertama
Iswanto
Iswanto
NIP. 197110619970310004

Pihak Kedua
Azis Andriansyah
Azis Andriansyah
NRP. 77050672

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	303.466.000,00

Jakarta, 24 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Azis Andriansyah
AZIS ANDRIANSYAH

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I
Iswanto
ISWANTO

Gambar 2. 13. PK Awal Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Perjanjian Kinerja ini tidak mengalami perubahan atau revisi karena tidak adanya perubahan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025.

2.3. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian sasaran merupakan instrumen utama dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program kerja demi mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis melalui lima indikator kinerja utama: masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat, dan dampak.

Selain hasil akhir, penilaian ini juga menyoroti efektivitas proses transformasi masukan menjadi keluaran dalam penyusunan kebijakan atau kegiatan strategis. Lingkup pengukuran kinerja ini terbagi menjadi dua kategori, yakni kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, di mana perhitungan persentase pencapaian targetnya disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasi yang ada. Adapun metode pengukurannya adalah sebagai berikut:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, yang dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Perhitungan pencapaian kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Evaluasi kinerja dilakukan berbasis instrumen PKK dan realisasi lapangan demi perbaikan program mendatang. Penilaiannya menggunakan skala ordinal dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Skala ordinal perhitungan pencapaian kinerja

NO.	KETERANGAN WARNA	INTERPRETASI
1		Kinerja > 85
2		75 < Kinerja < 85
3		60 < Kinerja < 75
4		Kinerja < 60
5		Belum bisa dinilai

Evaluasi kinerja dilakukan melalui E-monitoring dan dilaporkan berkala serta dipantau secara rutin oleh Kepala BP3KP Sumatera I.

2.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berperan sebagai instrumen operasional utama dalam merealisasikan perencanaan kinerja instansi. Di dalam kerangka SAKIP, DIPA menjadi jembatan strategis yang menghubungkan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, serta implementasi program yang berorientasi pada sasaran strategis. Evaluasi DIPA dalam laporan ini bertujuan mengukur keselarasan antara anggaran dan target, serta memotret realisasi output maupun outcome. Melalui analisis yang terintegrasi, laporan ini menyediakan informasi komprehensif untuk penguatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas anggaran berbasis hasil di masa mendatang. Berikut adalah rekapitulasi DIPA untuk lingkup Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal di Wilayah Sumatera I:

Tabel 2. 4. Rekapitulasi DIPA Awal Satuan Kerja Wilayah Sumatera I

No.	DIPA AWAL	BP3KP Sumatera I	Satker Prov Aceh
1	Sekretariat Jenderal	198.311.000	93.229.000
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	50.000.000	6.976.000.000
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	49.984.000	27.695.811.000
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	100.000.000	22.488.248.000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	45.000.000	-

Tabel 2. 5. Rekapitulasi DIPA Akhir Satuan Kerja Wilayah Sumatera I

No.	DIPA AKHIR	BP3KP Sumatera I	Satker Prov Aceh
1	Sekretariat Jenderal	1.446.695.000	498.219.000
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	510.940.000	22.173.714.000
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	321.853.000	22.748.555.000
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.051.245.000	28.549.564.000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000	-

2.4.1. DIPA Sekretariat Jenderal

Dukungan manajemen operasional perkantoran tahun 2025 dikelola melalui DIPA Sekretariat Jenderal pada BP3KP Sumatera I (Satker 691379). Sepanjang periode berjalan, DIPA ini telah melewati 7 (tujuh) kali tahapan revisi. Perubahan anggaran tersebut mencakup penyesuaian berkala lembar III DIPA setiap awal triwulan, penambahan alokasi dana sesuai instruksi Sekretariat Jenderal, serta pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Detail mengenai urutan perubahan anggaran BP3KP Sumatera I tersebut tersaji dalam Tabel 2.6 berikut:



Tabel 2. 6. Kronologi Revisi DIPA Sekretariat Jenderal TA 2025

DIPA Revisi ke – n / Tanggal DIPA	Nomor DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
DIPA Awal TA 2025 02 Desember 2024	SP DIPA- 146.01.1.691379/2025	Rp 198.311.000 ,-	DIPA Awal TA 2025
DIPA Revisi Ke- 1 11 Juni 2025	SP DIPA- 146.01.1.691379/2025	Rp 1.276.015.000,-	Penambahan Anggaran dari Pusat
DIPA Revisi Ke- 2 16 Juli 2025	SP DIPA- 146.01.1.691379/2025	Rp 1.276.015.000,-	Revisi Lembar III DIPA
DIPA Revisi Ke- 3 14 Oktober 2025	SP DIPA- 146.01.1.691379/2025	Rp 1.276.015.000,-	Revisi Lembar III DIPA
DIPA Revisi Ke- 4 31 Oktober 2025	SP DIPA- 146.01.1.691379/2025	Rp 1.345.015.000,-	Penambahan Anggaran dari Pusat
DIPA Revisi Ke- 5 13 November 2025	SP DIPA- 146.01.1.691379/2025	Rp 1.446.695.000,-	Penambahan Anggaran dari Pusat
DIPA Revisi Ke- 6 04 Desember 2025	SP DIPA- 146.01.1.691379/2025	Rp 1.446.695.000,-	Revisi Pemutakhiran Data POK
DIPA Revisi Ke- 7 12 Desember 2025	SP DIPA- 146.01.1.691379/2025	Rp 1.446.695.000,-	Revisi Pemutakhiran Data POK

2.4.2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

DIPA selanjutnya yang dikelola oleh BP3KP Sumatera I adalah DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (kode satker 691433), yang difokuskan pada kegiatan rekomendasi kebijakan Pendataan Program Tiga Juta Rumah di wilayah delineasi kawasan pesisir serta operasional Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tercatat telah terjadi 4 (empat) kali revisi anggaran pada DIPA ini. Jenis revisi yang dilaksanakan mencakup revisi berkala lembar III DIPA pada 10 (sepuluh) hari kerja pertama awal triwulan, penyesuaian penambahan anggaran berdasarkan instruksi Sekretariat Jenderal, serta proses pemutakhiran data POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Seluruh tahapan perubahan ini dapat dicermati pada kronologi revisi di Tabel 2.7:

Tabel 2. 7. Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA 2025

DIPA Revisi ke – n / Tanggal DIPA	Nomor DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
DIPA Awal TA 2025 02 Desember 2024	SP DIPA- 146.03.1.691433/2025	Rp 50.000.000 ,-	DIPA Awal TA 2025
DIPA Revisi Ke- 1 25 Juni 2025	SP DIPA- 146.03.1.691433/2025	Rp 180.640.000,-	Penambahan Anggaran dari Pusat
DIPA Revisi Ke- 2 16 Juli 2025	SP DIPA- 146.03.1.691433/2025	Rp 180.640.000,-	Revisi Lembar III DIPA
DIPA Revisi Ke- 3 15 Agustus 2025	SP DIPA- 146.03.1.691433/2025	Rp 510.940.000,-	Penambahan Anggaran dari Pusat
DIPA Revisi Ke- 4 14 Oktober 2025	SP DIPA- 146.03.1.691433/2025	Rp 510.940.000,-	Revisi Pemutakhiran Data POK



2.4.3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

DIPA berikutnya yang dikelola oleh BP3KP Sumatera I adalah DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (kode satker 691487), yang difokuskan pada penyusunan rekomendasi kebijakan Pendataan Program Tiga Juta Rumah di wilayah delineasi perdesaan. Tercatat telah terjadi 4 (empat) kali revisi anggaran pada DIPA ini. Jenis revisi yang dilaksanakan mencakup penyesuaian berkala lembar III DIPA pada 10 (sepuluh) hari kerja pertama setiap awal triwulan, revisi penambahan alokasi dana berdasarkan arahan Sekretariat Jenderal, serta pemutakhiran data POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Seluruh tahapan perubahan tersebut dipaparkan dalam kronologi pada Tabel 2.8:

Tabel 2. 8. Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA 2025

DIPA Revisi ke – n / Tanggal DIPA	Nomor DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
DIPA Awal TA 2025 02 Desember 2024	SP DIPA- 146.04.1.691487/2025	Rp 49.984.000 ,-	DIPA Awal TA 2025
DIPA Revisi Ke- 1 03 Juli 2025	SP DIPA- 146.04.1.691487/2025	Rp 187.061.000,-	Penambahan Anggaran dari Pusat
DIPA Revisi Ke- 2 16 Juli 2025	SP DIPA- 146.04.1.691487/2025	Rp 187.061.000,-	Revisi Lembar III DIPA
DIPA Revisi Ke- 3 24 Oktober 2025	SP DIPA- 146.04.1.691487/2025	Rp 321.853.000,-	Penambahan Anggaran dari Pusat
DIPA Revisi Ke- 4 12 Desember 2025	SP DIPA- 146.04.1.691487/2025	Rp 321.853.000,-	Revisi Pemutakhiran Data POK

2.4.4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

DIPA berikutnya yang dikelola oleh BP3KP Sumatera I adalah DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (kode satker 691541), yang difokuskan pada penyusunan rekomendasi kebijakan Pendataan Program Tiga Juta Rumah di wilayah delineasi perkotaan. Tercatat telah terjadi 4 (empat) kali revisi anggaran pada DIPA ini. Jenis revisi yang dilaksanakan mencakup penyesuaian berkala lembar III DIPA pada 10 (sepuluh) hari kerja pertama setiap awal triwulan, revisi penambahan alokasi dana berdasarkan arahan Sekretariat Jenderal, serta pemutakhiran data POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Seluruh tahapan perubahan tersebut dipaparkan dalam kronologi pada Tabel 2.9:



Tabel 2. 9. Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025

DIPA Revisi ke – n / Tanggal DIPA	Nomor DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
DIPA Awal TA 2025 02 Desember 2024	SP DIPA- 146.05.1.691541/2025	Rp 100.000.000 ,-	DIPA Awal TA 2025
DIPA Revisi Ke- 1 03 Juli 2025	SP DIPA- 146.05.1.691541/2025	Rp 220.234.000,-	Penambahan Anggaran dari Pusat
DIPA Revisi Ke- 2 16 Juli 2025	SP DIPA- 146.05.1.691541/2025	Rp 220.234.000,-	Revisi Lembar III DIPA
DIPA Revisi Ke- 3 09 Agustus 2025	SP DIPA- 146.05.1.691541/2025	Rp 1.051.245.000,-	Penambahan Anggaran dari Pusat
DIPA Revisi Ke- 4 12 Oktober 2025	SP DIPA- 146.05.1.691541/2025	Rp 1.051.245.000,-	Revisi Lembar III DIPA
DIPA Revisi Ke- 5 17 Oktober 2025	SP DIPA- 146.05.1.691541/2025	Rp 1.051.245.000,-	Revisi Pergeseran Anggaran Belanja 524 ke belanja 52 lainnya berdasarkan instruksi Pusat
DIPA Revisi Ke- 5 12 Desember 2025	SP DIPA- 146.05.1.691541/2025	Rp 1.051.245.000,-	Revisi Pemutakhiran Data POK

2.4.5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

BP3KP Sumatera I juga mengelola DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (satker 691595) untuk mendukung kebijakan tata kelola, pencegahan korupsi pembangunan perumahan, serta akselerasi ZI menuju WBK/WBBM. DIPA ini telah mengalami 5 (lima) kali revisi, yang mencakup revisi rutin Lembar III setiap awal triwulan (10 hari kerja pertama), penambahan anggaran sesuai arahan Sekjen, dan pemutakhiran POK. Detail perubahan tersebut tersaji dalam kronologi pada Tabel 2.10:

Tabel 2. 10. Kronologi Revisi DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

DIPA Revisi ke – n / Tanggal DIPA	Nomor DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
DIPA Awal TA 2025 02 Desember 2024	SP DIPA- 146.06.1.691595/2025	Rp 45.000.000 ,-	DIPA Awal TA 2025
DIPA Revisi Ke- 1 24 Juni 2025	SP DIPA- 146.06.1.691595/2025	Rp 303.466.000,-	Penambahan Anggaran dari Pusat
DIPA Revisi Ke- 2 16 Juli 2025	SP DIPA- 146.06.1.691595/2025	Rp 303.466.000,-	Revisi Lembar III DIPA
DIPA Revisi Ke- 3 14 Oktober 2025	SP DIPA- 146.06.1.691595/2025	Rp 303.466.000,-	Revisi Lembar III DIPA
DIPA Revisi Ke- 4 26 November 2025	SP DIPA- 146.06.1.691595/2025	Rp 303.466.000,-	Revisi Pemutakhiran Data POK
DIPA Revisi Ke- 5 12 Desember 2025	SP DIPA- 146.06.1.691595/2025	Rp 303.466.000,-	Revisi Pemutakhiran Data POK



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- Upaya Peningkatan Akuntabilitas
- Capaian Kinerja
- Analisis Perbandingan Kinerja
- Analisis Realisasi Anggaran
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

2025





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I tahun 2023 Nomor: PW.0204-Dr/591 tanggal 07 Juni 2024, implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dikategorikan BB (Sangat Baik) dengan nilai 74,60, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level staf. Rincian penilaian implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I tahun 2023 dapat dilihat pada Table 3.1. berikut:

Tabel 3. 1. Hasil evaluasi implementasi AKIP BP3KP Sumatera I Tahun 2023

NO.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	74,60

Belum optimalnya nilai implementasi AKIP tersebut dipengaruhi oleh beberapa kelemahan pada pemenuhan komponen maupun sub-komponen terkait. Guna meningkatkan akuntabilitas, Direktorat Jenderal Perumahan telah memberikan sejumlah rekomendasi untuk diimplementasikan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I pada tahun 2024, sebagaimana rincian berikut:

Tabel 3. 2. Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2023

NO.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Agar dalam kegiatan evaluasi berikutnya dapat dilengkapi dokumen perencanaan kinerja sampai 5 tahun sebelumnya;	1. Agar dalam kegiatan evaluasi berikutnya dapat dilengkapi dokumen perencanaan kinerja sampai 5 tahun sebelumnya;



NO.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		2. Agar dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja berikutnya (Renstra) periode akan datang dapat memperhatikan deadline dalam publikasi pada e-Sakip sesuai dengan Permen PUPR No. 9 Tahun 2018; 3. Agar menjadi perbaikan kedepannya untuk Penyusunan Renstra melampirkan metode pengukuran sesuai dengan IKU; 4. Agar dalam penyusunan Laporan Monev Bulanan berikutnya dapat menyajikan secara rinci pemantauan terhadap rencana aksi serta capaian indikator yang terdapat pada PK.	2. Akan diupayakan dalam penyusunan Renstra berikutnya dapat sesuai dengan waktu berdasarkan Permen PUPR No.9 Tahun 2018; 3. Akan menyajikan / melampirkan metode pengukuran sesuai dengan IKU dalam dokumen Renstra periode berikutnya. 4. Akan menyajikan secara rinci pemantauan terhadap rencana aksi serta capaian indikator yang terdapat pada PK.
2	Pengukuran Kinerja	1. Agar dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja pada periode berikutnya (Renstra) dapat menyajikan Tata Cara Pengukuran masing – masing indikator kinerja; 2. Agar dalam penyusunan Laporan Bulanan berikutnya dapat mencantumkan Capaian Kinerja terhadap PK secara detail; 3. Agar dalam Pengukuran Kinerja (SKP) dapat dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment; 4. Agar dalam penyusunan Laporan Monev Kinerja Bulanan pada periode selanjutnya dapat menyajikan terkait strategi, kebijakan, dan aktivitas dalam mencapai kinerja; 5. Agar dalam Penyusunan Laporan Monev Bulanan dapat dijelaskan secara eksplisit dan detail permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan.	1. Akan menyajikan Tata Cara Pengukuran masing – masing indikator kinerja pada dokumen Perencanaan Kinerja pada periode berikutnya (Renstra). 2. Dalam penyusunan Laporan Bulanan berikutnya Akan mencantumkan/ menyajikan Capaian Kinerja terhadap PK secara detail; 3. Dalam Pengukuran Kinerja (SKP) berikutnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I akan memberi Reward dan Punishment; 4. Sudah dilakukan upaya penyajian terkait strategi, kebijakan, dan aktifitas dalam mencapai kinerja di dalam Laporan Monev Kinerja Bulanan; 5. Sudah dilakukan upaya penyajian terkait penjelasan secara eksplisit dengan detail terkait permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan di dalam laporan Monev Bulanan.
3	Pelaporan Kinerja	1. Agar pada Laporan Kinerja periode berikutnya ringkasan eksekutif dapat menggambarkan capaian kinerja, maupun hal-hal penting lainnya; 2. Agar dalam penyusunan Laporan Monev Bulanan berikutnya dapat menyajikan secara rinci tindak lanjut atas permasalahan pada periode sebelumnya serta capaian kinerja berdasarkan target perjanjian kinerja (PK);	1. Sudah dilakukan upaya penyajian pada ringkasan eksekutif terkait capaian kinerja selama 5 tahun kebelakang dalam bentuk tabel capaian kinerja, beserta narasi capaiannya; 2. Sudah dilakukan upaya penyajian secara rinci terkait permasalahan pada periode sebelumnya serta capaian kinerja di dalam laporan monev bulanan.



NO.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan menuangkan hasilnya dalam menyajikan secara rinci tindak lanjut atas permasalahan pada periode sebelumnya serta rekomendasi dengan baik bukti pelaksanaan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi; 2. Agar dalam penyusunan laporan kinerja dapat menjelaskan perbandingan secara menyeluruh dari periode ke periode untuk menunjukkan perbaikan/ perubahan kinerja.	1. Sudah dilakukan upaya penyajian seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi internal dalam menyajikan secara rinci tindak lanjut atas permasalahan pada periode sebelumnya beserta rekomendasi; 2. Sudah dilakukan upaya penyajian dalam penyusunan laporan kinerja dengan menjelaskan perbandingan secara menyeluruh selama 5 periode di dalam tabel capaian kinerja beserta upaya perbaikan dan tindak lanjut kedepan.

3.2. Capaian Kinerja

Kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dilaksanakan dalam rangka mendukung 2 (dua) program yaitu program perumahan dan kawasan permukiman dan program dukungan manajemen Sekretariat Jenderal. Capaian kinerja kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3. Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
SEKRETARIAT JENDERAL				
SK. 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen			
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	2 Layanan	2 Layanan	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
SK. 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni			
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 laporan	1 laporan	100



Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	100
SK. 2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah kawasan permukiman			
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	100
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1001 Unit	994 Unit	99,3
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
SK. 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan			
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100
SK. 2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan			
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan	2 Laporan	100
2	Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Wilayah Perdesaan	1048 Unit	1047 Unit	99,9
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN				
SK. 1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100
SK. 2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan			



Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
2	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	64 Unit	64 Unit	100
SK. 3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	553 Unit	553 Unit	100
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO				
SK. 1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efektif dan Akuntabel			
1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
SK. 2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Jumlah Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100

Berdasarkan tabel tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I memiliki 17 indikator kinerja yang berasal dari gabungan indikator kinerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Capaian kinerja kegiatan mencapai 99,95%, yang merupakan rata-rata dari 15 indikator yang memenuhi target (100%) dan 2 indikator yang belum mencapai target.

Indikator yang belum tercapai secara maksimal terdapat pada pelaksanaan kegiatan BPS di Provinsi Aceh (8 unit), yang tidak dapat dilanjutkan akibat kendala bencana hidrometeorologi serta pembatalan atau pengunduran diri calon penerima bantuan.

3.2.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Layanan Dukungan Manajemen

Pelaksanaan layanan dukungan manajemen menunjukkan bentuk capaian realisasi kegiatan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di kelola oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Layanan Dukungan Manajemen BP3KP Sumatera I

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	2 Layanan	2 Layanan	100

Target pelaksanaan dukungan manajemen adalah sebanyak 2 layanan dengan realisasi 1 layanan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dan 1 layanan pada satker PKP Provinsi Aceh. Metode pelaksanaan layanan dukungan manajemen dilakukan secara swakelola oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I.



Gambar 3. 1. Laporan Akhir 2025 Pelaksanaan Layanan Dukungan Manajemen BP3KP Sumatera I

Adapun pemenuhan layanan dukungan manajemen yang dilakukan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I antara lain sebagai berikut:

- Keperluan Perkantoran: Dukungan logistik harian pegawai dan layanan internet guna menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi.



- b) Kegiatan Pertemuan: Penyediaan dukungan dana untuk koordinasi, diskusi, serta pembahasan program dan rencana kerja yang membutuhkan sumber daya intensif.
- c) Perbaikan Peralatan Kantor: Pemeliharaan rutin terhadap aset yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang berdasarkan penelaahan RKBMN TA 2025 guna optimalisasi usia pakai barang.
- d) Pengadaan Peralatan: Modernisasi fasilitas kantor dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi anggaran, serta laporan kondisi barang untuk mendukung perkembangan teknologi informasi.
- e) Perawatan Kendaraan Dinas: Pemeliharaan berkala kendaraan jabatan (Eselon 3) dan operasional, termasuk biaya BBM, dengan berpedoman pada standar biaya masukan (SBM) TA 2025.
- f) Layanan Daya dan Jasa: Pemenuhan kebutuhan dasar operasional (Listrik, PDAM, Internet) serta jasa keamanan dan kebersihan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
- g) Operasional Pimpinan: Dukungan kegiatan operasional dan koordinasi pimpinan bersama mitra kerja terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

3.2.2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 menghasilkan 1 rekomendasi kebijakan dan 821 layanan dimana hal ini melebihi target layanan tahun 2025 yaitu sebanyak 800 layanan.

Tabel 3. 5. Capaian Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025

Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
800 Layanan	821 Layanan	102,63

Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I pada tahun 2025 menjadi target kinerja sebanyak 1 laporan, yang dituangkan dalam Laporan Akhir 2025 Klinik PKP BP3KP Sumatera I.



Gambar 3. 2. Laporan Akhir 2025 Klinik PKP BP3KP Sumatera I

Dalam mendukung pencapaian penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP Sumatera I melaksanakan kegiatan Klinik PKP tahun 2025 berupa layanan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis yang dilakukan secara daring maupun luring. Adapun rincian capaian kegiatan selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

A. Penyiapan Ruang Pelayanan Klinik PKP

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (Klinik PKP), BP3KP Sumatera I telah menyiapkan ruang pelayanan sebagai sarana pendukung layanan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis kepada



Gambar 3. 3. Ruang Klinik PKP BP3KP Sumatera I

masyarakat dan pemangku kepentingan. Ruang pelayanan ini dirancang untuk menunjang kenyamanan dan efektivitas layanan, baik secara luring maupun sebagai pusat koordinasi layanan daring. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan kualitas pelayanan Klinik PKP dapat meningkat.

B. Pembuatan Leaflet dan Banner Klinik PKP dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mendukung diseminasi informasi, BP3KP Sumatera I telah melakukan pembuatan leaflet dan banner Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta program perumahan dan kawasan permukiman. Media ini digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan agar lebih mudah memahami layanan Klinik PKP dan program yang dilaksanakan.

Dengan adanya leaflet dan banner tersebut, diharapkan penyebarluasan informasi dapat berjalan lebih efektif dan meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat.



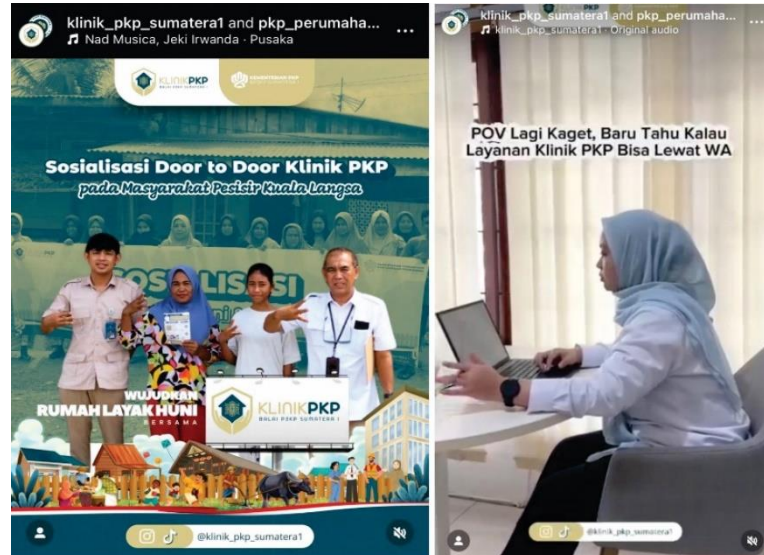
Gambar 3. 4. Leaflet dan Banner Klinik PKP BP3KP Sumatera I

C. Infografis/Videografis Terkait Klinik PKP

Infografis dan videografis Klinik PKP merupakan bagian dari strategi komunikasi publik untuk meningkatkan penyebaran informasi dan pemahaman masyarakat terhadap layanan Klinik PKP. Konten visual ini menyajikan informasi mengenai jenis layanan, mekanisme konsultasi, serta edukasi perumahan layak huni



secara informatif dan mudah dipahami. Pemanfaatan media digital tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.



Gambar 3. 5. Unggahan Infografis dan Videografis Klinik PKP di Instagram BP3KP Sumatera I

D. Capaian Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP Sumatera I

Capaian layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) BP3KP Sumatera I pada tahun berjalan menunjukkan pelaksanaan layanan yang optimal dalam mendukung penyediaan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Layanan yang diberikan mencakup penyampaian informasi program, pendampingan teknis, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pelaksanaan layanan dilakukan melalui mekanisme daring dan luring, sehingga dapat menjangkau pengguna layanan secara lebih luas dan fleksibel. Dengan dukungan sarana prasarana, media informasi, serta sumber daya yang tersedia, Klinik PKP BP3KP Sumatera I mampu memberikan layanan yang efektif dan responsif. Secara keseluruhan, capaian layanan Klinik PKP BP3KP Sumatera I menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendukung kelancaran pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.



Tabel 3. 6. Capaian Layanan Klinik PKP BP3KP Sumatera I TA 2025

BALAI	LAYANAN	TARGET TAHUN 2025			
		SEP	OKT	NOV	DES
SUMATERA I	Rencana	100	300	300	100
	Realisasi	128	404	478	478
	Kumulatif Rencana	100	400	700	800
	Kumulatif Realisasi	128	404	533	821
	Deviasi	28	4	-167	21

Berdasarkan Tabel 3.5, capaian layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP Sumatera I tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi layanan pada periode September hingga Desember umumnya melampaui target bulanan yang ditetapkan. Pada bulan September dan Oktober, realisasi masing-masing sebesar 128 dan 404 layanan, lebih tinggi dari target sebesar 100 dan 300 layanan. Meskipun pada bulan November terjadi deviasi kumulatif sebesar -167 terhadap rencana, secara keseluruhan capaian kembali meningkat pada bulan Desember dengan realisasi kumulatif mencapai 821 layanan, melampaui target sebesar 800 layanan.

Dengan demikian, capaian layanan Klinik PKP BP3KP Sumatera I secara kumulatif mencapai 102,63%, yang menunjukkan kinerja sangat baik dalam memenuhi target layanan yang telah ditetapkan, meskipun terdapat fluktuasi pada periode tertentu.

E. Kegiatan Sosialisasi, Layanan Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Capaian Akhir

Kegiatan sosialisasi, layanan konsultasi, dan bimbingan teknis Klinik PKP BP3KP Sumatera I pada tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap selama periode September hingga Desember di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh melalui metode rembuk warga, door to door, serta kolaborasi dengan kegiatan forum. Adapun jabaran kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Pada bulan September, kegiatan difokuskan pada program *Saweu Gampong* di Kabupaten Aceh Besar dengan capaian 73 layanan serta di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 45 layanan. Selain itu, melalui partisipasi dalam FGD Ranperbup RP2KPKPK Kabupaten Aceh Selatan berhasil dihimpun 10

layanan, sehingga total capaian bulan September menunjukkan kontribusi awal yang signifikan.

- b) Pada bulan Oktober, kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 45 layanan, Kota Langsa sebanyak 56 layanan, dan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 24 layanan. Kegiatan FGD di Kabupaten Aceh Selatan juga kembali memberikan tambahan 10 layanan, sehingga capaian layanan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.
- c) Pada bulan November, kegiatan menjangkau Kota Banda Aceh melalui Gampong Geuceu Iniem 31 layanan dan Gampong Jawa 27 layanan, Kabupaten Aceh Besar di Desa Lamkunyut 44 layanan dan Desa Kuta Karang 19 layanan, serta wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah sebanyak 55 layanan. Namun, pelaksanaan kegiatan di Aceh Tengah sempat terhenti akibat bencana banjir.
- d) Pada bulan Desember, kegiatan diintensifkan di Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 52 layanan, Kabupaten Aceh Besar sebanyak 114 layanan, serta wilayah sekitar Kota Banda Aceh sebanyak 122 layanan, yang menjadi capaian tertinggi selama periode pelaksanaan.



Gambar 3. 6. Sosialisasi dan Layanan Klinik PKP BP3KP Sumatera I

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis menunjukkan tren peningkatan capaian layanan serta kontribusi positif dalam memperluas jangkauan dan pemanfaatan layanan Klinik PKP oleh masyarakat, meskipun terdapat kendala pada beberapa periode pelaksanaan.

F. Kerja Sama dan Kegiatan Lain Penunjang Klinik PKP



Kegiatan kerja sama dan kegiatan lain penunjang Klinik PKP BP3KP Sumatera I pada tahun 2025 dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai instansi dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Klinik PKP. Kerja sama yang masih aktif dilaksanakan dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah Aceh (BJKW), antara lain melalui kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi program padat karya, yang dimanfaatkan sebagai media sosialisasi layanan Klinik PKP. Selain itu, kegiatan kolaborasi juga dilakukan melalui forum diskusi (FGD), kegiatan edukasi masyarakat, serta berbagai event yang melibatkan pemangku kepentingan.

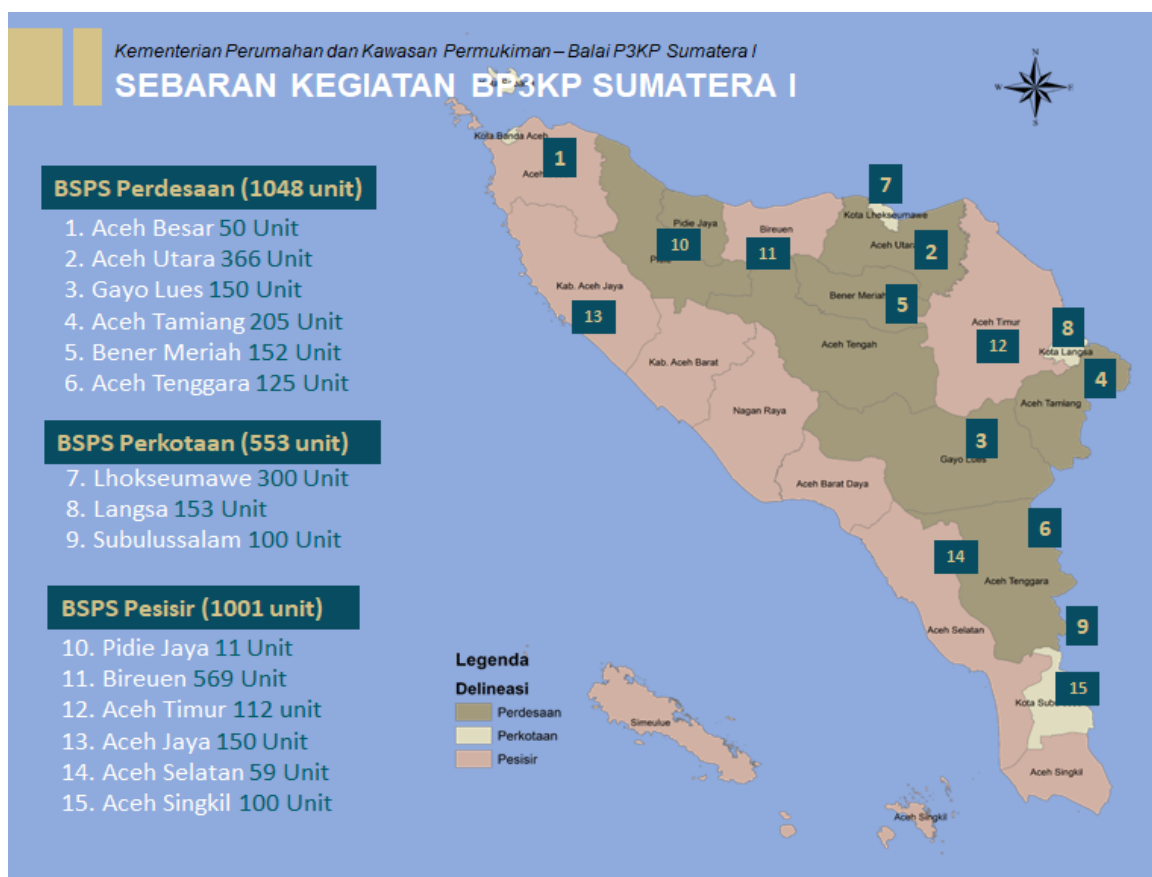
Melalui kegiatan kerja sama dan kolaborasi tersebut, berhasil dihimpun capaian layanan berupa informasi, konsultasi, dan bantuan teknis yang berkontribusi terhadap total capaian layanan Klinik PKP BP3KP Sumatera I sebesar 75 dan 74 layanan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, kegiatan kerja sama dan penunjang ini terbukti efektif dalam meningkatkan jangkauan layanan, memperluas akses informasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan Klinik PKP.



Gambar 3. 7. Pelaksanaan sosialisasi dan pembagian brosur Klinik PKP dalam kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi program padat karya BJKW I Banda Aceh

3.2.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan dan Swadaya (BSPS)

Penyaluran bantuan perumahan melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) oleh BP3KP Sumatera I pada periode ini mencakup tiga kategori deliniasi wilayah utama, yaitu Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir. Berdasarkan peta sebaran kegiatan, total intervensi mencapai 2.602 unit yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sebaran ini menunjukkan komitmen instansi dalam menjangkau berbagai karakteristik wilayah guna memastikan pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Aceh.



Gambar 3. 8. Sebaran penyaluran BSPS di Provinsi Aceh

Seluruh rangkaian kegiatan fisik ini didasari oleh tahapan administratif dan persiapan yang matang, yang meliputi:

- Legalitas Penyaluran: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Satuan Kerja PKP, PPK Rumah Swadaya, dan Bank Aceh selaku bank penyalur



hasil evaluasi kinerja (Evkin) 2024, yang telah dilaksanakan pada 3 September 2025.



Gambar 3. 9. PKS Satker dan Bank/Pos Penyalur

- b) Validasi Data: Pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL) yang berlangsung pada 6 hingga 12 September 2025.



Gambar 3. 10. Dokumentasi kegiatan verifikasi BSPPS

(a) verifikasi perdesaan (b) verifikasi perkotaan (c) verifikasi pesisir

- c) Pemberdayaan Masyarakat: Rangkaian sosialisasi kepada calon penerima, pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), serta penyusunan proposal teknis yang diselesaikan dalam rentang waktu 14 September hingga 20 Oktober 2025.



Gambar 3. 11. Dokumentasi kegiatan pembentukan KPB

(a) pembentukan KPB perdesaan (b) pembentukan KPB perkotaan (c) pembentukan KPB pesisir

- d) Kesiapan Logistik: Penyelesaian Proses Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk menjamin ketersediaan material bangunan yang sesuai standar.



Gambar 3. 12. Dokumentasi kegiatan pemilihan toko terbuka
(a) PTT perdesaan (b) PTT perkotaan (c) PTT pesisir

- e) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di pada setiap kabupaten yang ada di delineasi perdesaan, perkotaan dan pesisir.

3.2.3.1. Pelaksanaan BSPS pada Delineasi Perdesaan

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada delineasi perdesaan tersebar di 6 (enam) kabupaten yaitu Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Bener Meriah dengan total 1048 unit BSPS.



Gambar 3. 13. Peta Sebaran pelaksanaan BSPS Delineasi Perdesaan

Re-
alisasi fisik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2025 untuk kategori perdesaan tercatat sebesar 37,86% hingga Desember. Akselerasi progres masih terhambat oleh faktor alam berupa bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara.



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I

Tabel 3. 7. Rencana dan Realisasi Kegiatan BSPS Delineasi Perdesaan TA 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	TARGET (unit)		BULAN												KETERANGAN
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. TAHAP PERSIAPAN (10%)																	
1	Pengusulan dan Penetapan Lokasi*	1,00	1.048	RC	838	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.048	1.048	1.048	1.048	
2	Penyiapan Tim Pelaksana*	1,00	1.048	RC	393	917	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.048	1.048	1.048	1.048	
3	Seleksi Calon Penerima Bantuan*	2,00	1.048	RC		1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.048	1.048	1.048	1.048	
4	Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan	1,00	1.048	RC		1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.048	1.048	1.048	1.048	
5	Sosialisasi dan Penyuluhan	2,00	1.048	RC		524	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.048	1.048	1.048	1.048	
6	Penyusunan Proposal*	3,00	1.048	RC		524	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	1.048	1.048	1.048	
B. TAHAP PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI (90%)																	
7	Penetapan SK Penerima BSPS oleh PPK	10,00	1.048	RC		524	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	1.048	1.048	1.048	
8	Pencairan Dana dari KPPN ke Rekening Giro Satter	2,00	1.048	RC		786	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	1.048	1.048	1.048	
9	Penyaluran Dana ke Tabungan Penerima Bantuan	2,00	1.048	RC		524	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	1.048	1.048	1.048	
10	Pemesanan Bahan Bangunan Tahap I	2,00	1.048	RC		524				524	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	1.048	1.048	1.048	
11	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I	9,00	1.048	RC						524	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	740	803	
12	Transfer Dana BSPS tahap I ke Toko Bahan Bangunan	5,00	1.048	RC						346	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	272	341	
13	Pelaksanaan konstruksi tahap I	15,00	1.048	RC						346	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	37	58	
14	Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap I	2,50	1.048	RC							786	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	90	
15	Progres Fisik Rumah 30%	2,50	1.048	RC							786	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	17	
16	Laporan Penggunaan Dana Tahap I	2,00	1.048	RC							786	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	37	58	
17	Pemesanan Bahan Bangunan Tahap II	2,00	1.048	RC							524	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	1.048	
18	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II	9,00	1.048	RC							524	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-	
19	Transfer Dana BSPS tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan	5,00	1.048	RC							346	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-	
20	Pelaksanaan konstruksi tahap II	15,00	1.048	RC							262	786	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-	
21	Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap II / sekaligus tahap I dan II*	2,50	1.048	RC								524	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-	
22	Progres Fisik Rumah 100%	2,50	1.048	RC								210	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-	
23	Laporan Penggunaan Dana Tahap II	2,00	1.048	RC								210	1.048	1.048	1.048	1.048	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	37	75	
SUB TOTAL A(%)		10,00	1.048	RC	0,80	6,88	9,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	7,00	10,00	10,00	10,00	
SUB TOTAL B(%)		90,00	1.048	RC	-	5,00	13,50	14,00	14,00	26,10	61,15	81,40	90,00	90,00	90,00	90,00	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	16,00	24,32	27,86	
TOTAL PROGRES (%)		100,00	1.048	RC	0,80	11,88	23,38	24,00	24,00	36,10	71,15	91,40	100,00	100,00	100,00	100,00	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	7,00	26,00	34,32	37,86	

Selain kendala cuaca, dinamika di lapangan juga mencatat adanya satu kasus pengunduran diri dari calon penerima bantuan di wilayah perdesaan. Berikut rekapitulasi pelaksanaan BSPS delineasi perdesaan TA 2025.

Tabel 3. 8. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan BSPS delineasi perdesaan TA 2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	ALOKASI	SK PPK	PENGEMBALIAN		MELANJUTKAN/ REALISASI
				BATAL/ MENGUNDURKAN DIRI	TERDAMPAK BENCANA	
PROVINSI ACEH		2602	2602	4	4	2594
PERDESAAN		1048	1048	1	0	1047
1	ACEH BESAR	50	50	1	0	49
2	ACEH TAMIANG	205	205	0	0	205
3	ACEH TENGGARA	125	125	0	0	125
4	ACEH UTARA	366	366	0	0	366
5	BENER MERIAH	152	152	0	0	152
6	GAYO LUES	150	150	0	0	150



Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan, berikut disajikan dokumentasi visual progres fisik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 pada delineasi perdesaan. Foto-foto berikut merangkum tahapan pembangunan di berbagai kabupaten, mulai dari progres konstruksi hingga kondisi terkini di wilayah terdampak bencana, yang menunjukkan dedikasi tim dalam memastikan keberlanjutan program meskipun menghadapi tantangan hidrometeorologi. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di berbagai kabupaten/kota pada delineasi perdesaan:

1. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Aceh Besar



Gambar 3. 14. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Besar

2. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Aceh Utara



Gambar 3. 15. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Utara



3. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Aceh Tamiang



Gambar 3. 16. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Tamiang

4. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Aceh Tenggara



Gambar 3. 17. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Tenggara

5. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Gayo Lues



Gambar 3. 18. Pelaksanaan BSPS di Kab. Gayo Lues

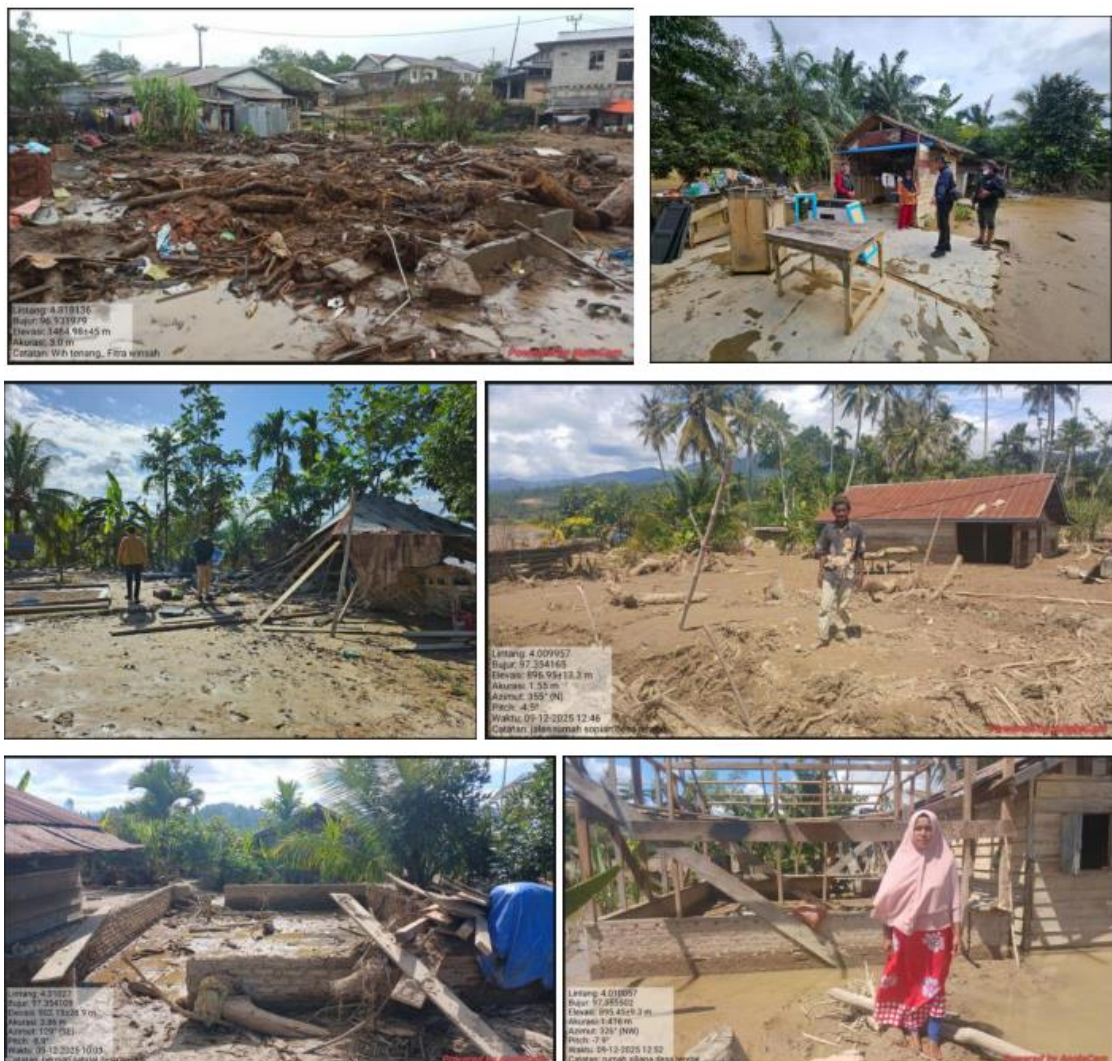


6. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Bener Meriah



Gambar 3. 19. Pelaksanaan BPS di Kab. Bener Meriah

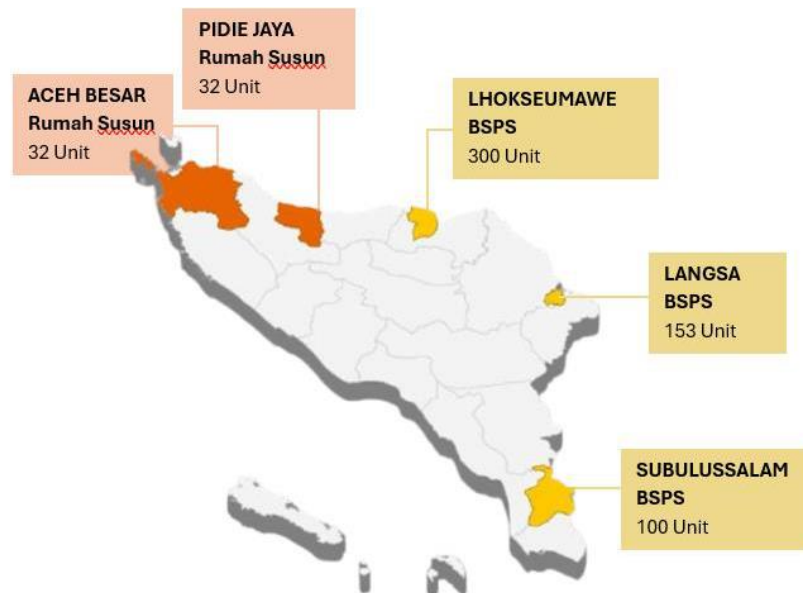
7. Dokumentasi pasca bencana hidrometeorologi pada delineasi perdesaan



Gambar 3. 20. Kondisi pasca bencana hidrometeorologi pada delineasi perdesaan

3.2.3.2. Pelaksanaan BSPS pada Delineasi Perkotaan

Pelaksanaan kegiatan pada Delineasi Perkotaan difokuskan melalui dua instrumen utama, yaitu pembangunan Rumah Susun dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Untuk program BSPS, intervensi mencakup total 553 unit yang terdistribusi secara strategis di tiga wilayah perkotaan: Kota Lhokseumawe sebagai konsentrasi terbesar dengan 300 unit, Kota Langsa sebanyak 153 unit, dan Kota Subulussalam sebanyak 100 unit. Selain itu, guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkotaan, telah dilaksanakan pula pembangunan Rumah Susun sebanyak 64 unit yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie Jaya. Integrasi kedua program ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat di kawasan perkotaan yang padat penduduk.



Gambar 3. 21. Peta Sebaran pelaksanaan BSPS Delineasi Perkotaan

Hingga posisi Desember 2025, realisasi fisik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada delineasi perkotaan telah mencapai 59%. Meskipun progres berjalan secara berkelanjutan, pelaksanaan di lapangan sempat terkendala oleh dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam. Namun demikian, stabilitas data penerima bantuan tetap terjaga; tidak tercatat adanya peserta yang mengundurkan diri maupun pembatalan bantuan akibat dampak bencana tersebut.



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I

Tabel 3. 10. Rencana dan Realisasi Kegiatan BSPS Delineasi Perkotaan TA 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	TARGET (unit)	BULAN												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. TAHAP PERSIAPAN (10%)																	
1	Pengusulan dan Penetapan Lokasi*	1,00	553	RC	442	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	553	553	553	553
2	Penyiapan Tim Pelaksana*	1,00	553	RC	207	484	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	553	553	553	553
3	Seleksi Calon Penerima Bantuan*	2,00	553	RC	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	553	553	553	553
4	Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan	1,00	553	RC	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	553	553	553	553
5	Sosialisasi dan Penyuluhan	2,00	553	RC	277	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	553	553	553	553
6	Penyusunan Proposal*	3,00	553	RC	277	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	553	553	553	553
B. TAHAP PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI (90%)																	
7	Penetapan SK Penerima BSPS oleh PPK	10,00	553	RC	277	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	553	553	553
8	Pencairan Dana dari KPPN ke Rekening Giro Satker	2,00	553	RC	415	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553		
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	553	553	553
9	Penyaluran Dana ke Tabungan Penerima Bantuan	2,00	553	RC	277	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	553	553	553
10	Pemesanan Bahan Bangunan Tahap I	2,00	553	RC	277	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	553	553	553
11	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I	9,00	553	RC	277	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	371	549
12	Transfer Dana BSPS tahap I ke Toko Bahan Bangunan	5,00	553	RC	182	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	126	482
13	Pelaksanaan konstruksi tahap I	15,00	553	RC	182	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	111	419
14	Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap I	2,50	553	RC	415	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	237
15	Progres Fisik Rumah 30%	2,50	553	RC	415	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	8
16	Laporan Penggunaan Dana Tahap I	2,00	553	RC	415	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	109	369
17	Pemesanan Bahan Bangunan Tahap II	2,00	553	RC	277	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	549
18	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II	9,00	553	RC	277	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	28
19	Transfer Dana BSPS tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan	5,00	553	RC	182	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-
20	Pelaksanaan konstruksi tahap II	15,00	553	RC	138	415	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	8
21	Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap II / sekaligus tahap I dan II*	2,50	553	RC	277	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-
22	Progres Fisik Rumah 100%	2,50	553	RC	111	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-
23	Laporan Penggunaan Dana Tahap II	2,00	553	RC	111	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	117	608
SUB TOTAL A(%)		10,00	553	RC	0,80	6,88	9,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10,00	10,00	10,00	10,00
SUB TOTAL B(%)		90,00	553	RC	-	5,00	13,50	14,00	14,00	26,10	61,15	81,40	90,00	90,00	90,00	90,00	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	16,00	27,04	49,00	
TOTAL PROGRES (%)		100,00	553	RC	0,80	11,88	23,38	24,00	24,00	36,10	71,15	91,40	100,00	100,00	100,00	100,00	
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10,00	26,00	37,04	59,00	

Tabel 3. 9. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan BSPS delineasi perkotaan TA 2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	ALOKASI	SK PPK	PENGEMBALIAN		MELANJUTKAN/ REALISASI
				BATAL/ MENGUNDURKAN DIRI	TERDAMPAK BENCANA	
PROVINSI ACEH		2602	2602	4	4	2594
II. PERKOTAAN		553	553	0	0	553
1	LANGSA	153	153	0	0	153
2	SUBULUSSALAM	100	100	0	0	100
3	LHOKSEUMAWE	300	300	0	0	300



Berikut adalah kompilasi dokumentasi pelaksanaan kegiatan BSPS Delineasi Perkotaan yang mencakup sebaran 553 unit bantuan. Galeri visual ini menyajikan perkembangan konstruksi secara berkala di lapangan, yang menjadi basis verifikasi capaian kinerja fisik sekaligus gambaran komitmen masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan yang lebih sehat dan teratur. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di berbagai kota pada delineasi perkotaan:

1. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kota Lhokseumawe



Gambar 3. 22. Pelaksanaan BSPS di Kota Lhokseumawe

2. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kota Langsa



Gambar 3. 23. Pelaksanaan BSPS di Kota Langsa



3. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kota Subulussalam



Gambar 3. 24. Pelaksanaan BSPS di Kota Subulussalam

3.2.3.3. Pelaksanaan BSPS pada Delineasi Pesisir

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada delineasi pesisir mencakup intervensi sebanyak 1.001 unit. Alokasi bantuan tersebut didistribusikan secara strategis di enam wilayah administratif, yang meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.



Gambar 3. 25. Peta Sebaran pelaksanaan BSPS Delineasi Perdesaan



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I

Realisasi fisik kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2025 di wilayah pesisir tercatat sebesar 46,63% hingga bulan Desember. Akselerasi progres di lapangan mengalami hambatan signifikan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Selain kendala alam, terjadi penyesuaian data sasaran karena terdapat tiga penerima bantuan yang mengundurkan diri serta empat penerima lainnya yang tidak dapat melanjutkan program akibat terdampak bencana secara langsung.

Tabel 3. 11. Rencana dan Realisasi Kegiatan BSPS Delineasi Pesisir TA 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	TARGET (unit)		BULAN												KETERANGAN
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. TAHAP PERSIAPAN (10%)																	
1	Pengusulan dan Penetapan Lokasi*	1,00	1.001	RC	801	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.001	1.001	1.001	1.001
2	Penyiapan Tim Pelaksana*	1,00	1.001	RC		375	876	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.001	1.001	1.001	1.001
3	Seleksi Calon Penerima Bantuan*	2,00	1.001	RC		1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.001	1.001	1.001	1.001
4	Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan	1,00	1.001	RC		1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.001	1.001	1.001	1.001
5	Sosialisasi dan Penyuluhan	2,00	1.001	RC		501	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.001	1.001	1.001	1.001
6	Penyusunan Proposal*	3,00	1.001	RC		501	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	1.001	1.001	1.001	1.001
B. TAHAP PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI (90%)																	
7	Penetapan SK Penerima BSPS oleh PPK	10,00	1.001	RC		501	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	1.001	1.001	1.001
8	Pencairan Dana dari KPPN ke Rekening Giro Satker	2,00	1.001	RC			751	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	1.001	1.001	1.001
9	Penyaluran Dana ke Tabung Penerima Bantuan	2,00	1.001	RC			501	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	1.001	1.001	1.001
10	Pemesanan Bahan Bangunan Tahap I	2,00	1.001	RC			501			501	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	1.001	1.001	1.001
11	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I	9,00	1.001	RC						501	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	807	984
12	Transfer Dana BSPS tahap I ke Toko Bahan Bangunan	5,00	1.001	RC						330	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	96	455
13	Pelaksanaan konstruksi tahap I	15,00	1.001	RC						330	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	163	444
14	Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap I	2,50	1.001	RC						751	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	243
15	Progres Fisik Rumah 30%	2,50	1.001	RC						751	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	2	100
16	Laporan Penggunaan Dana Tahap I	2,00	1.001	RC						751	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-
17	Pemesanan Bahan Bangunan Tahap II	2,00	1.001	RC						501	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	1.001
18	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II	9,00	1.001	RC						501	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-
19	Transfer Dana BSPS tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan	5,00	1.001	RC						330	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-
20	Pelaksanaan konstruksi tahap II	15,00	1.001	RC						250	751	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-
21	Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap II / sekaligus tahap I dan II*	2,50	1.001	RC						501	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-
22	Progres Fisik Rumah 100%	2,50	1.001	RC								200	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-
23	Laporan Penggunaan Dana Tahap II	2,00	1.001	RC								200	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	-
SUB TOTAL A(%)		10,00	1.001	RC	0,80	6,88	9,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	7,00	10,00	10,00	10,00
SUB TOTAL B(%)		90,00	1.001	RC	-	5,00	13,50	14,00	14,00	26,10	61,15	81,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	16,00	26,18	36,63
TOTAL PROGRES (%)		100,00	1.001	RC	0,80	11,88	23,38	24,00	24,00	36,10	71,15	91,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				RL	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	7,00	26,00	36,18	46,63



Tabel 3. 12. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan BSPS delineasi pesisir TA 2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	ALOKASI	SK PPK	PENGEMBALIAN		MELANJUTKAN/ REALISASI	KETERANGAN
				BATAL/ MENGUNDURKAN DIRI	TERDAMPAK BENCANA		
PROVINSI ACEH		2602	2602	4	4	2594	
I. PESISIR		1001	1001	3	4	994	
1	PIDIE JAYA	11	11	0	0	11	
2	ACEH JAYA	150	150	0	0	150	
3	ACEH SELATAN	59	59	0	0	59	
4	ACEH SINGKIL	100	100	0	0	100	
5	ACEH TIMUR	112	112	1	0	111	
6	BIREUEN	569	569	2	4	563	1 PB PENARIKAN DANA SAMPAI DENGAN UPAH TAHAP I 3 PB PENARIKAN DANA SAMPAI DENGAN MATERIAL TAHAP 1

Sebagai bentuk transparansi atas realisasi fisik di lapangan, bagian ini menyajikan dokumentasi visual pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2025 pada Delineasi Pesisir. Rangkaian foto berikut mendokumentasikan perkembangan konstruksi di enam kabupaten prioritas, mulai dari Pidie Jaya hingga Aceh Singkil. Dokumentasi ini tidak hanya menjadi bukti serapan bantuan, tetapi juga potret ketangguhan para penerima bantuan dalam melanjutkan pembangunan hunian layak meskipun berada di wilayah yang rentan terhadap tantangan hidrometeorologi. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di berbagai kota pada delineasi pesisir:

1. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Pidie Jaya



Gambar 3. 26. Pelaksanaan BSPS di Kab. Pidie Jaya



2. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Bireuen



Gambar 3. 27. Pelaksanaan BSPS di Kab. Bireuen

3. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Aceh Timur



Gambar 3. 28. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Timur

4. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Aceh Jaya



Gambar 3. 29. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Jaya



5. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Aceh Selatan



Gambar 3. 30. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Selatan

6. Dokumentasi pelaksanaan BSPS di Kabupaten Aceh Singkil



Gambar 3. 31. Pelaksanaan BSPS di Kab. Aceh Singkil

7. Dokumentasi kondisi pasca bencana hidrometeorologi pada delineasi pesisir



Gambar 3. 32. Kondisi pasca bencana hidrometeorologi pada delineasi pesisir

Secara keseluruhan, pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2025 telah berjalan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas hunian di Provinsi Aceh. Hingga Desember, progres fisik menunjukkan capaian yang bervariasi, yakni 59% di Delineasi Perkotaan, 46,63% di Delineasi Pesisir, dan 37,86% di Delineasi Perdesaan. Meskipun realisasi lapangan menghadapi tantangan berat akibat bencana hidrometeorologi di berbagai kabupaten, integritas program tetap terjaga melalui penyelesaian tahapan administratif yang solid, mulai dari PKS bersama Bank Aceh hingga verifikasi CPB dan pemilihan toko material. Dinamika data seperti pengunduran diri penerima bantuan di wilayah pesisir dan perdesaan telah ditangani sesuai prosedur akuntabilitas, sehingga program tetap memberikan dampak nyata bagi pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

3.2.4. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun

BP3KP Sumatera I telah merealisasikan pembangunan Rumah Susun (Rusun) sebanyak 64 Unit (2 Tower) yang difokuskan pada sektor pendidikan keagamaan. Pembangunan ini bertujuan menyediakan hunian vertikal yang layak dan sehat guna mendukung sarana asrama bagi santri di Provinsi Aceh.



Gambar 3. 33. Peta sebaran pembangunan rusun BP3KP Sum I



3.2.4.1. Rumah Susun Pondok Pesantren Yayasan Waqaf Quran Haroen Ali Kuta Malaka Dayah Darul Quran Aceh (DQA)

BP3KP Sumatera I merealisasikan pembangunan 1 Tower Rumah Susun di Dayah Darul Quran Aceh (DQA) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hunian yang efisien di lahan terbatas. Pembangunan 32 unit rusun ini menjadi instrumen penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal yang nyaman, aman, dan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung negara.

Tabel 3. 13. Realisasi Pertriwulan Pembangunan Rusun Pondok Pesantren Yayasan Waqaf Quran Haroen Ali Kuta Malaka Dayah Darul Quran Aceh (DQA)

	Mar		Juni		Sept		Des	
	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real
Fisik	6,26%	14,99%	40,83%	33,27%	75,75%	75,79%	100%	100%
Keuangan		6,00%		6,00%		60,00%		100%

Pembangunan rumah susun Pondok Pesantren Yayasan Wakaf Quran Haroen Ali Kuta Malaka Dayah Darul Quran Aceh (DQA) merupakan kegiatan dengan Multi Years Contract (MYC) Tahun 2024-2025. Pembangunan rumah susun telah selesai pada tanggal 2 Desember 2025.

Tabel 3. 14. Ringkasan Data Umum, Kontrak, dan Perubahan Addendum Kegiatan Rusun DQA

A. DATA UMUM		
Alamat	Jl. Banda Aceh – Medan Km.19,5, Kel. Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar	
Tipe	Barak / Rembunai / 3 Lantai	
Tower/Unit/Kapasitas	1 Tower / Unit / 126 orang	
Pagu Fisik	(2024) Rp 424.296.000,-	
	(2025) Rp 6.647.304.000,-	
	(TOTAL) Rp 7.071.600.000,-	
B. DATA KONTRAK		
Penyedia Jasa	PT. Ensargus Indra Utama	
Nomor Kontrak	594/PKS/Rb1.5/2024	
Tanggal Kontrak	09 Desember 2024	
Periode Kontrak	240 Hari	
	(09 Desember 2024 – 05 Agustus 2025)	
Nilai Kontrak	(2024) Rp 424.296.000,-	
	(2025) Rp 6.646.154.600,-	
	(TOTAL) Rp. 7.070.450.600,-	
C. ADDENDUM I		
Nomor Addendum I	02/SPK-ADD 1/Dk.19/2025	
Tanggal Addendum I	25 Februari 2025	
Periode Addendum I	345 Hari	
	(09 Desember 2024 – 18 November 2025)	
Nilai Addendum I	Rp. 7.070.450.600,- (TETAP)	



	Hal	Penambahan waktu dengan alasan: 1. Kompensasi terkait dengan perubahan nomenklatur dari Kementerian PUPR menjadi Kementerian PKP; 2. Kompensasi karena rincian nama-nama paket belum muncul pada DIPA.
D.	ADDENDUM II	
	Nomor Addendum II	12/SPMK-ADD II/Dk.19/2025
	Tanggal Addendum II	05 Juni 2025
	Periode Addendum II	345 Hari (09 Desember 2024 – 18 November 2025)
	Nilai Addendum II	Rp. 7.070.450.600,- (TETAP)
	Hal	Pergantian PPK
E.	ADDENDUM III	
	Nomor Addendum III	31/SPK-ADD III/Dk.19/2025
	Tanggal Addendum III	22 September 2025
	Periode Addendum III	345 Hari (09 Desember 2024 – 18 November 2025)
	Nilai Addendum III	Rp. 7.070.450.600,- (TETAP)
	Hal	Penyesuaian Item Pekerjaan; Perubahan Rekening
F.	ADDENDUM IV	
	Nomor Addendum IV	106/SPK-ADD IV/DK.19/2025
	Tanggal Addendum IV	13 November 2025
	Periode Addendum IV	359 Hari (09 Desember 2024 – 02 Desember 2025)
	Nilai Addendum IV	Rp. 7.070.450.600,- (TETAP)
	Hal	Penambahan Waktu dan Denda

Tabel 3. 15. Ringkasan Data Kontrak dan Perubahan (Addendum) Konsultan Manajemen Rusun DQA

A.	KONSULTAN MANAJEMEN	
	Penyedia Jasa	PT. Builco Total Konsultan
	Nomor Kontrak	598/PKS/Rb1.5/2024
	Tanggal Kontrak	09 Desember 2024
	Periode Kontrak	240 Hari (09 Desember 2024 – 05 Agustus 2025)
	Nilai Kontrak	(2024) Rp 25.380.000,- (2025) Rp 375.913.860,- (TOTAL) Rp 401.293.860,-
B.	ADDENDUM I	
	Nomor Addendum I	04/SPK-ADD 1/Dk.19/2025
	Tanggal Addendum I	25 Februari 2025
	Periode Addendum I	345 Hari (09 Desember 2024 – 18 November 2025)
	Nilai Addendum I	Rp 401.293.860,- (TETAP)
	Hal	Penambahan waktu
C.	ADDENDUM II	
	Nomor Addendum II	14/SPK-ADD II/Dk.19/2025
	Tanggal Addendum II	05 Juni 2025
	Periode Addendum II	345 Hari (09 Desember 2024 – 18 November 2025)
	Nilai Addendum II	Rp 401.293.860,- (TETAP)
	Hal	Pergantian PPK
D.	ADDENDUM III	
	Nomor Addendum III	76/SPK-ADD II/Dk.19/2025



Tanggal Addendum III	30 September 2025
Periode Addendum III	345 Hari
	(09 Desember 2024 – 18 November 2025)
Nilai Addendum III	Rp 420.186.060,- (Penambahan 4,71%)
Hal	Penambahan biaya personal dan non personil
E. ADDENDUM IV	
Nomor Addendum IV	110/SPK-ADD IV/DK.19/2025
Tanggal Addendum IV	13 November 2025
Periode Addendum IV	359 Hari
	(09 Desember 2024 – 02 Desember 2025)
Nilai Addendum IV	Rp 420.186.060,- (TETAP)
Hal	Penambahan Waktu

Sebagai bentuk dokumentasi dan transparansi pelaksanaan kegiatan, berikut disajikan foto-foto progres pembangunan rumah susun yang menggambarkan kondisi terkini di lapangan. Dokumentasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan pekerjaan serta menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.



Gambar 3. 34. Pembangunan Rusun Pondok Pesantren Yayasan Wakaf Quran Haroen Ali Kuta Malaka Dayah Darul Quran Aceh (DQA)



3.2.4.2. Rumah Susun Pondok Pesantren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima

Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima merupakan proyek strategis dengan skema Multi Years Contract (MYC) tahun anggaran 2024–2025. Memasuki November 2025, proyek ini sejatinya telah mencatatkan progres signifikan sebesar 99,60%. Namun, bencana hidrometeorologi yang melanda sebagian besar wilayah Aceh pada 26 November 2025 turut berdampak pada aset tersebut, sehingga memicu kondisi keadaan kahar (force majeure)

Menindaklanjuti arahan Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta hasil reviu teknis pascabencana, telah dilakukan rekonsiliasi data antara Pejabat Pembuat Komitmen, Manajemen Konstruksi, dan Penyedia Jasa. Berdasarkan perhitungan bersama tersebut, bobot realisasi pekerjaan yang sebelumnya terlapor 99,60% secara resmi dikoreksi menjadi 91,71% sebagai dasar penilaian prestasi pekerjaan sebelum terjadinya bencana.

Tabel 3. 16. Ringkasan Data Umum, Kontrak, dan Perubahan Addendum Kegiatan Rusun Pondok Pesantren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima

A. DATA UMUM		
Alamat	Jl. Teungku Chiek Pante Geulima, Kel. Meunasah Lhok, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya	
Tipe	Barak / Rembunai / 3 Lantai	
Tower/Unit/Kapasitas	1 Tower / Unit / 126 orang	
Pagu Fisik	(2024) Rp 425.616.000,-	
	(2025) Rp 6.687.984.000,-	
	(TOTAL) Rp 7.113.600.000,-	
B. DATA KONTRAK		
Penyedia Jasa	CV. Labang Donya	
Nomor Kontrak	591/PKS/Rb1.5/2024	
Tanggal Kontrak	09 Desember 2024	
Periode Kontrak	240 Hari	
	(09 Desember 2024 – 05 Agustus 2025)	
Nilai Kontrak	(2024) Rp 425.616.000,-	
	(2025) Rp 6.646.530.000,-	
	(TOTAL) Rp 7.072.146.000,-	
C. ADDENDUM I		
Nomor Addendum I	01/SPK-ADD 1/Dk.19/2025	
Tanggal Addendum I	25 Februari 2025	
Periode Addendum I	345 Hari	
	(09 Desember 2024 – 18 November 2025)	
Nilai Addendum I	Rp 7.072.146.000,- (TETAP)	
Hal	Penambahan waktu dengan alasan: 1. Kompensasi terkait dengan perubahan nomenklatur dari Kementerian PUPR menjadi Kementerian PKP; 2. Kompensasi karena rincian nama - nama paket belum muncul pada DIPA.	
D. ADDENDUM II		



	Nomor Addendum II	09/SPK-ADD II/Dk.19/2025
	Tanggal Addendum II	05 Juni 2025
	Periode Addendum II	345 Hari
		(09 Desember 2024 – 18 November 2025)
	Nilai Addendum II	Rp 7.072.146.000,- (TETAP)
	Hal	Pergantian PPK
E.	ADDENDUM III	
	Nomor Addendum III	09/SPK-ADD II/Dk.19/2025
	Tanggal Addendum III	05 Juni 2025
	Periode Addendum III	345 Hari
		(09 Desember 2024 – 18 November 2025)
	Nilai Addendum III	Rp 7.072.146.000,- (TETAP)
	Hal	Pergantian Personil (Project Manager)
F.	ADDENDUM IV	
	Nomor Addendum IV	104/SPK-ADD IV/DK.19/2025
	Tanggal Addendum IV	13 November 2025
	Periode Addendum IV	375 Hari
		(09 Desember 2024 – 18 Desember 2025)
	Nilai Addendum IV	Rp 7.072.146.000,- (TETAP)
	Hal	Penambahan Waktu dan Denda
F.	ADDENDUM V	
	Nomor Addendum V	129/SPK-ADD V/DK.19/2025
	Tanggal Addendum V	11 Desember 2025
	Periode Addendum V	388 Hari
		(09 Desember 2024 – 31 Desember 2025)
	Nilai Addendum V	Rp 7.072.146.000,- (TETAP)
	Hal	Penambahan Waktu (Keadaan Kahar)

Tabel 3. 17. Ringkasan Data Kontrak dan Perubahan (Addendum) Konsultan Manajemen Rusun Pondok Pesantren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima

A.	KONSULTAN MANAJEMEN	
	Penyedia Jasa	CV. Pelita Buana
	Nomor Kontrak	596/PKS/Rb1.5/2024
	Tanggal Kontrak	09 Desember 2024
	Periode Kontrak	240 Hari
		(09 Desember 2024 – 05 Agustus 2025)
	Nilai Kontrak	(2024) Rp 25.440.000,-
		(2025) Rp 355.912.710,-
		(TOTAL) Rp 381.352.710,-
B.	ADDENDUM I	
	Nomor Addendum I	03/SPK-ADD 1/Dk.19/2025
	Tanggal Addendum I	25 Februari 2025
	Periode Addendum I	345 Hari
		(09 Desember 2024 – 18 November 2025)
	Nilai Addendum I	Rp 381.352.710,- (TETAP)
	Hal	Penambahan waktu
C.	ADDENDUM II	
	Nomor Addendum II	13/SPK-ADD II/Dk.19/2025
	Tanggal Addendum II	05 Juni 2025
	Periode Addendum II	345 Hari
		(09 Desember 2024 – 18 November 2025)
	Nilai Addendum II	Rp 381.352.710,- (TETAP)
	Hal	Pergantian PPK



D.	ADDENDUM III	
	Nomor Addendum III	79/SPK-ADD III/Dk.19/2025
	Tanggal Addendum III	30 September 2025
	Periode Addendum III	345 Hari
		(09 Desember 2024 – 18 November 2025)
	Nilai Addendum III	Rp 420.186.060,- (Penambahan 9,21%)
	Hal	Penambahan biaya personal dan non personil
E.	ADDENDUM IV	
	Nomor Addendum IV	110/SPK-ADD IV/DK.19/2025
	Tanggal Addendum IV	13 November 2025
	Periode Addendum IV	359 Hari
		(09 Desember 2024 – 02 Desember 2025)
	Nilai Addendum IV	Rp 420.186.060,- (TETAP)
	Hal	Penambahan waktu

Berikut merupakan dokumentasi kondisi rusun sebelum dan sesudah terjadinya bencana hidrometeorologi. Dokumentasi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan pekerjaan serta menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.



Gambar 3. 35. Kondisi Rusun Pondok Pesantren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima sebelum bencana



Gambar 3. 36. Kondisi Rusun Pondok Pesantren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima setelah bencana

3.2.5. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I merupakan langkah konkret dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Melalui komitmen kolektif terhadap enam area perubahan, BP2P Sumatera I telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam setiap aspek pelayanan publik. Berikut adalah capaian strategis yang telah diraih dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.

3.2.5.1. Capaian Pembangunan ZI Tiap Area Perubahan TA 2025

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan progres signifikan melalui penguatan di enam area perubahan. Upaya ini difokuskan pada internalisasi budaya kerja berintegritas dan peningkatan kualitas layanan publik yang akuntabel. Adapun rincian capaian pada masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut:



- a. Pemenuhan Komponen Pengungkit pada Pembangunan ZI pada Tim Pelaksana Bidang Manajemen Perubahan TA 2025 pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) mencapai 72,92%, namun belum memperoleh penilaian dari Tim Penilai Usulan (TPU). Pemenuhan Komponen Reform telah mencapai 12,50%, namun belum memperoleh penilaian dari Tim Penilai Usulan (TPU).
- b. Pemenuhan Komponen Pengungkit pada Pembangunan ZI pada Tim Pelaksana Bidang Penataan Tata Laksana TA 2025 pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) telah mencapai 54,76%, dan Pemenuhan Komponen Reform telah mencapai 14,29%, namun belum memperoleh penilaian dari Tim Penilai Usulan (TPU).
- c. Pemenuhan Komponen Pengungkit pada Pembangunan ZI pada Tim Pelaksana bidang Penataan Sistem Manajemen SDM TA 2025 pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) telah mencapai 100%, dan memperoleh nilai 95,83% dari Tim Penilai Usulan (TPU). Pemenuhan Komponen Reform telah mencapai 40,00%, namun belum memperoleh penilaian dari Tim Penilai Usulan (TPU).
- d. Pemenuhan Komponen Pengungkit pada Pembangunan ZI pada Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja TA 2025 pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) telah mencapai 100%, namun belum memperoleh penilaian dari Tim Penilai Usulan (TPU). Pemenuhan Komponen Reform telah mencapai 40%, namun belum memperoleh penilaian dari Tim Penilai Usulan (TPU).
- e. Pemenuhan Komponen Pengungkit pada Pembangunan ZI pada Tim Penguatan Pengawasan TA 2025 pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) telah mencapai 100%, namun belum memperoleh penilaian dari Tim Penilai Usulan (TPU). Pemenuhan Komponen Reform telah mencapai 100%, namun belum memperoleh penilaian dari Tim Penilai Usulan (TPU).
- f. Pemenuhan Komponen Pengungkit pada Pembangunan ZI pada Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik TA 2025 pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) telah mencapai 100%, namun belum memperoleh penilaian dari Tim Penilai Usulan (TPU). Pemenuhan Komponen Reform telah mencapai 100%, namun belum memperoleh penilaian dari Tim Penilai Usulan (TPU).



3.2.5.2. Matriks Sebelum dan Sesudah Pembangunan ZI Tiap Area Perubahan

Perbandingan kondisi pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I pada saat sebelum dan sesudah dilakukan Pembangunan Zona Integritas TA 2025 pada setiap area perubahan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 18. Matriks sebelum dan sesudah pembangunan ZI

No.	Sebelum	Sesudah
A. Area Manajemen Perubahan		
1	Unit kerja belum membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas	Unit kerja telah dibentuk, melalui proses yang demokratis dan terbuka serta telah berjalan dengan aktif dan baik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai tim pembangunan Zona Integritas di unit kerja
2	Perencanaan pembangunan zona integritas belum tersusun dalam dokumen atau panduan pembangunan zona integritas	Dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas telah disusun yang berisi metode dan mekanisme untuk mencapai target atau prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
3	Kegiatan pemantau dan evaluasi pembangunan Zona Integritas belum maksimal menyeluruh	Kegiatan pemantau dan evaluasi pembangunan Zona Integritas sudah dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan rencana kerja, dilakukan secara mendalam dan berorientasi pada hasil
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja belum maksimal sebelum ditetapkan role model	Telah Ditetapkan Role model yaitu agen perubahan yang menjadi contoh membangun budaya kinerja yang melibatkan seluruh anggota organisasi dalam merubah pola pikir untuk membangun budaya kinerja yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas
5	Belum adanya penerapan media <i>campaign</i> Pembangunan ZI	Sudah adanya banner dan baliho <i>campaign</i> pembangunan ZI, sudah adanya penerapan pin anti gratifikasi pendukung Pembangunan ZI
6	Belum adanya Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai	Sudah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
B. Area Tata Laksana		
1	Belum terdapat SOP yang mengacu pada peta proses bisnis	Sudah terdapat SOP proses bisnis Balai, yaitu SOP Utama contoh SOP Monev Program Pembangunan Rusun, Rusus, BPS dan PSU. Serta SOP Pendukung seperti SOP kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, agen perubahan, dan pembentukan tim poka ZI. dan SOP Layanan Informasi Publik beserta SK Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



2	Sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi, tetapi belum menerapkan inovasi di dalam penggunaan aplikasi tersebut, seperti belum ada aplikasi khusus terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan <i>Backlog</i> perumahan sebagai pengelolaan data unit kerja	Sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi, serta sudah menerapkan inovasi di dalam penggunaan aplikasi tersebut, seperti belum ada aplikasi khusus terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan <i>Backlog</i> perumahan sebagai pengelolaan data unit kerja
3	Operasional Manajemen SDM sudah menggunakan teknologi, tetapi belum menerapkan inovasi di dalam penggunaan aplikasi tersebut	Operasional Manajemen SDM sudah menggunakan teknologi, serta sudah menerapkan inovasi di dalam penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan kedisiplinan pegawai dalam kehadiran
4	Belum ada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik	Sudah ada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dan sudah dipublikasikan secara rutin dan melalui berbagai media cetak dan media social
5	Belum dilakukan pemberian pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi	Sudah dilakukan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara sistem aplikasi pada Layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS)
C.	Area Sistem Manajemen SDM	
1	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja (LKE Point 1)	- Adanya Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan. - Sudah dilaksanakan Evaluasi pegawai dengan kriteria, Pegawai kehadiran terbanyak, pegawai dengan pelayanan terbaik dan keterlambatan terbanyak, dan ditampilkan pada hall kantor BP3KP S1.
2	Belum melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan (LKE Point 2)	Sudah dilakukan Mutasi Jabatan pada 6 Agustus 2025, yakni pada Jabatan dan Tempat Kedudukan Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I.
3	Belum adanya Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi dan Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan (LKE Point 3)	Adanya Pelatihan Pengantar Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan pada Rabu, 26 November 2025 s.d Rabu, 3 Desember 2025, melalui <i>platform Zoom Meeting</i> .
4	Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi (LKE Point 4)	Sudah ada penetapan atau penilaian Kinerja pada Semester II tahun 2025
5	Belum Optimalnya Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan / diimplementasikan (LKE Point 5)	Sudah Dilaksanakan Apel Mingguan yang dilakukan sebagai Upaya untuk menjaga kedisiplinan dan kebersamaan.



6	Belum adanya Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala (LKE Point 6)	Sudah ter updatenya data CV Pegawai Balai Penyediaan Perumahan Sumatera I dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh.
D. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1	Pimpinan belum terlibat sepenuhnya	- Keterlibatan pimpinan sudah lebih fokus dan menyeluruh. - Pimpinan unit kerja telah terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan.
2	Belum terkelola akuntabilitas kinerja	- Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan lengkap (RKKAL, DIPA, Renstra, dan PK) yang berorientasi hasil. - Unit kerja telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai 2025-2025. - Laporan Kinerja tersampaikan sebelum tenggat waktu dan telah melalui proses asistensi dan pembahasan.
E. Area Penguatan Pengawasan		
1	- Belum dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. - Pengendalian gratifikasi Belum diimplementasikan.	- Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. - Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan.
2	- Belum dibangun lingkungan pengendalian. - Belum dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan. - Belum dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi - SPI Belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.	- Telah dibangun lingkungan pengendalian. - Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan. - Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. - SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
3	- Kebijakan Pengaduan masyarakat Belum diimplementasikan - Pengaduan masyarakat Belum ditindaklanjuti - Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat - Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Belum ditindaklanjuti	- Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan - Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti - Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat - Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
4	- Whistle Blowing System Belum diterapkan - Belum dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System - Hasil Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System Belum ditindaklanjuti	- Whistle Blowing System telah diterapkan - Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System - Hasil Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti



5	- Belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama - Penanganan Benturan Kepentingan Belum disosialisasikan/internalisasi - Penanganan Benturan Kepentingan Belum diimplementasikan - Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan - Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Belum ditindaklanjuti	- Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama - Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi - Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan - Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan - Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
F.	Area Kualitas Pelayanan Publik	
1	Belum terdapat program kegiatan Layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS)	Sudah dilaksanakan program kegiatan Layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS)
2	Belum ditetapkan Standar Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Publik telah ditetapkan untuk melaksanakan pelayanan prima
3	Belum terdapat SOP Pelayanan Klinik Perumahan	Sudah terdapat SOP Pelayanan Klinik Perumahan
4	Belum ada SOP Pengaduan Masyarakat melalui media sosial	Sudah ada SOP Pengaduan Masyarakat melalui media sosial
5	Belum dilaksanakan Kegiatan Kolaborasi KRS dengan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Sudah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Kolaborasi KRS dengan Mal Pelayanan Publik (MPP)
6	Belum ada sarana Layanan Pengaduan Masyarakat	Sudah ada sarana Layanan Pengaduan Masyarakat berupa kotak pengaduan dan website KRS
7	Belum dilakukan survey kepuasan Masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik	Sudah dilakukan survey melalui kuisioner kepuasan Masyarakat dalam menerima layanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik



3.2.5.3. Dokumentasi Pembangunan ZI

A. Area Manajemen Perubahan

Berikut disajikan visualisasi kegiatan pembangunan Zona Integritas Area Manajemen Perubahan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I selama Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3. 19. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area manajemen perubahan

Dokumentasi

Ket: Rapat Evaluasi Bulanan ZI

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
 Nomor : 270/KPTS/BP1/2025
 Tanggal : 24 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN		
NO	Nama/NIP	Kedudukan
1.	Chairma Uffa, S.T.	Agan Perubahan
2.	Sm. Hamzah Subhan, S.T.	Agan Perubahan
3.	Muhammad Aidy Umra, S.P.W.K.	Agan Perubahan
4.	Muhammad Rizwan Anfa, S.Kom.	Agan Perubahan
5.	Mirzan Zuhri Zamia, S.T.	Agan Perubahan
6.	Aldy Arnyul, S.T.	Agan Perubahan
7.	Husnul Fahrul Manalu, S.T.	Agan Perubahan
8.	Nabillah Aulfa Rahman, S.P.W.K.	Agan Perubahan
9.	Faradita Zaskia Putri, S.Ars	Agan Perubahan
10.	Intan Salsabilla, S.Ak	Agan Perubahan

Kepala Balai Pelaksana
 Penyediaan Perumahan dan Kawasan
 Permukiman Sumatera I


 Chairma Uffa, S.T., M.Si
 197111061997031004

Ket: Penetapan Agen Perubahan

Dokumentasi

Ket: Pembahasan LKE ZI

NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I

Ket: Tampak depan Kantor terlihat sambutan selamat datang/ Campaign ZI



Ket: Dokumen Perencanaan ZI



Ket: Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan ZI BP3KP Sumatera I

Ket: Briefieng mingguan Balai

B. Area Penguatan Tata Laksana

Berikut disajikan visualisasi kegiatan pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Tata Laksana di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I selama Tahun Anggaran 2025:

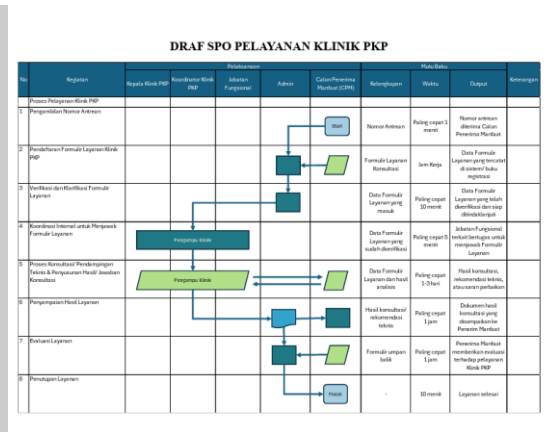
Tabel 3. 20. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area penguatan tata laksana

Dokumentasi	Dokumentasi
Ket: tangkapan layar SOP Penyusunan Anggaran BP3KP Sumatera I	Ket: SOP Pengajuan dan Pertanggungjawaban UP BP3KP Sumatera I



LAPORAN KINERJA

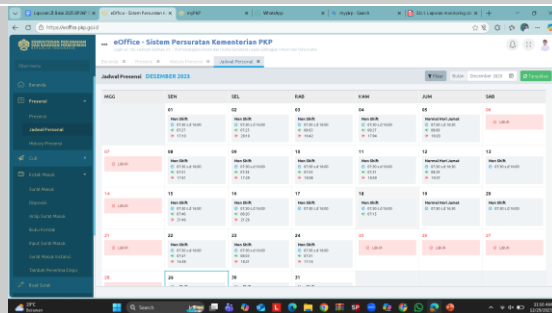
BP3KP SUMATERA I



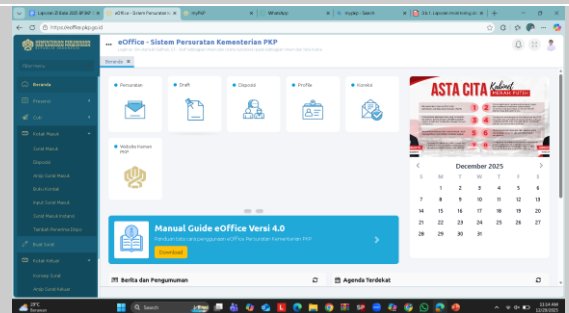
Ket: SPO Pelayanan Klinik PKP



Ket: Informasi Publik Brosur Klinik PKP BP3KP Sumatera I



Ket: Pengisian Daftar Kehadiran melalui Aplikasi MyPKP



Ket: Penyampaian Tata Naskah Dinas melalui Aplikasi TNDE

SASARAN KINERJA PEGAWAI
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERIODE PENILAIAN: 1 JULI 2023 S.D. 31 DESEMBER 2023

PEGAWAI YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA: Putri Ulia Rahmah, S.T.	NAMA: Anisah Rumanah, S.T., M.Si.
NIP: 199501052024212017	NIP: 197010111998032003
PANGKAT/GOL. RIANG: Ahli Pertama (IX)	PANGKAT/GOL. RIANG: Pembina (IV/a)
JABATAN: Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	JABATAN: Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
UNIT KERJA: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	UNIT KERJA: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

NO.	RENCANA HASIL KERJA ATASAN YANG DINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Ketepatan Perencanaan Anggaran sesuai dengan perencanaan	Kualitas	Pelaksanaan Penyerapan Anggaran sesuai dengan perencanaan	100%
2	Penyelesaian Penyerapan Anggaran tepat waktu	Penyelesaian Penyerapan Anggaran sesuai dengan target waktu yang ditentukan	Waktu	Penyelesaian pelaksanaan penyerapan anggaran sesuai dengan target waktu yang ditentukan	12 Bulan Kalender
3	Jumlah dokumen pelaksanaan dan penyerapan anggaran	Kuantitas	Kuantitas	Penyelesaian dokumen pelaksanaan dan penyerapan	1 Laporan

Ket: Penilaian Kinerja Pegawai ASN dengan Pendekatan Hasil Kerja Kuantitatif



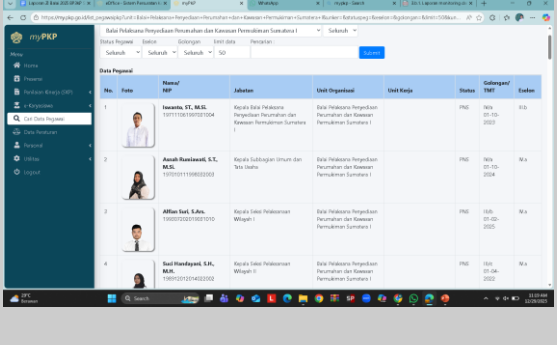
Ket: Pemberian Pelayanan Kepada Publik melalui Klinik PKP



C. Area Sistem Manajemen SDM

Berikut disajikan visualisasi kegiatan pembangunan Zona Integritas Area Manajemen SDM di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I selama Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3. 21. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area manajemen SDM

Dokumentasi	Dokumentasi
	
Ket: Apel Rutin Setiap Senin Jam 07.30	Ket: Pengarahan Inspektur Jenderal
	
Ket: Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas	Ket: Data Informasi Kepegawaian Unit Kerja

D. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Berikut disajikan visualisasi kegiatan pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I selama Tahun Anggaran 2025:



Tabel 3. 22. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dokumentasi	Dokumentasi
	 26/11/2025 10:16:23 +6 57 0038, +96 998686 +25.14m Kabupaten, Selatan Aceh Indonesia Hulu Pisang Nafisah
Ket: Monev pelaksanaan BSPS	Ket: Monev pelaksanaan BSPS
	
Ket: Monev Pelaksanaan Rusun	Ket: Monev Pelaksanaan Rusun
 KEMENPER REPUBLIC INDONESIA LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM Unit Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Periode Bulan November Tahun 2025	
Ket : Laporan Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sumatera I	



E. Area Penguatan Pengawasan

Berikut disajikan visualisasi kegiatan pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Pengawasan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I selama Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3. 23. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area penguatan pengawasan

Dokumentasi	Dokumentasi
	
Ket: Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	Ket: Kunjungan atau Branch Marking Ke Instansi Berpredikat WBK di LAN Aceh Besar
	
Ket: Koordinasi dengan Instansi Berpredikat WBK di Balai Besar POM Banda Aceh	Ket: Koordinasi dengan Instansi Berpredikat WBK di Kanwil Bea Cukai Aceh



Ket: Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dengan narasumber dari 3 instansi eksternal



Ket: Sharing Session Pembangunan Zona Integritas



Ket : Sosialisasi Membangun Budaya Integritas dan Pelayanan Publik Berkualitas



Ket : Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko



Ket: Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran



Ket: Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi sektor Publik



Ket: Sosialisasi Antigratifikasi oleh Tim Internal dengan sasaran Calon Penerima Bantuan (CPB) dan masyarakat yang Dilaksanakan pada 15 Oktober 2025.



Ket: Sosialisasi Antigratifikasi oleh Tim Internal dengan masyarakat



Ket: Pencetakan Buku Saku Pegawai Negeri Sipil



Ket: Publikasi Banner Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sumatera I



Ket: Penggunaan barcode untuk pengisian buku tamu

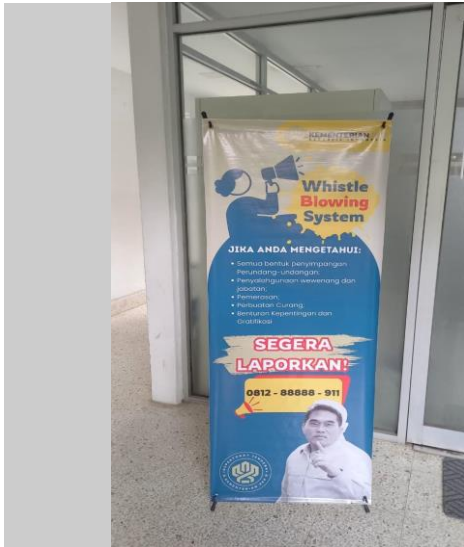


Ket : Publikasi Peraturan Jam Kerja Pejabat dan Pegawai Kementerian PKP



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I



Ket : Publikasi WBS (Whistle Blowing System)



Ket : Publikasi Tolak Gratifikasi



Ket : Publikasi Anti Korupsi



Ket : Publikasi Waspada Penyakit ASN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	
PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT	
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I	
Dasar hukum: - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenklatur - Permendagri No.3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah - Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik - Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik	Kualifikasi Pelaksana: - Kompetensi Public Speaking - Kompetensi mengoperasikan Aplikasi - Kompetensi mengetik laporan dengan Aplikasi Office
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan: T.PC, notebook, flashdisk, server, UPS, dll Z.ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir
Peringatan: Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan Pelayanan Pengaduan dari masyarakat terganggu	Penilaian dan Pendataan:

Ket: SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat



F. Area Peningkatan Pelayanan Publik

Berikut disajikan visualisasi kegiatan pembangunan Zona Integritas Area Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I selama Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3. 24. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan ZI area peningkatan pelayanan publik

Dokumentasi	Dokumentasi
	
Ket: Perbaikan Penataan Ruang Layanan Publik dan Klinik PKP	Ket: Poster, Baliho, Banner
 	
Ket: Layanan Klinik PKP	
	
Ket: Mushola	Ket: Ruang Laktasi



3.2.6. Capaian Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

Sebagai upaya menjaga keberlangsungan program pembangunan, BP2P Sumatera I secara konsisten mengelola risiko organisasi dan operasional. Adapun capaian penerapan manajemen risiko tersebut terangkum dalam poin-poin berikut:

3.2.6.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025, yang meliputi sosialisasi kebijakan Manajemen Risiko, penyusunan profil risiko, perumusan rencana tindak pengendalian risiko, pemantauan dan evaluasi level risiko, pemanfaatan aplikasi Manajemen Risiko, serta penyusunan dan penyampaian laporan Manajemen Risiko kepada Pimpinan dan Pemangku Kepentingan internal dan Kepentingan Eksternal.

Dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I sebagai Unit Pelaksana Teknis tingkat UPT R-2 berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan/Output/Indikator yang mencakup: (1) meningkatnya ketersediaan rumah layak huni, (2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan, serta (3) meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I telah menetapkan Komitmen Manajemen Risiko Tahun 2025 melalui aplikasi Manajemen Risiko Kementerian PKP. Komitmen Manajemen Risiko tersebut telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja sebagai Pemilik Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Nomor Komitmen Manajemen Risiko : 202510240003
- b) Tahun : 2025
- c) Pemilik Risiko : Iswanto, ST., M.Si.
- d) Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I



- e) Unit Pengelola Risiko : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
- f) Pengelola Risiko : Ansah Rumiawati, ST., M.Si.
- g) Jabatan Pengelola Risiko : Kasubbag Umum dan Tata Usaha BP3KP Sumatera I

Penetapan komitmen ini menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan Manajemen Risiko di lingkungan BP3KP Sumatera I, termasuk penyusunan profil risiko, perumusan rencana tindak pengendalian risiko, serta pemantauan dan evaluasi level risiko secara berkala. Dokumen komitmen Manajemen Risiko ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bentuk akuntabilitas pimpinan unit kerja dalam pengelolaan risiko organisasi.

3.2.6.2. Penilaian Risiko

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana dimaksud, BP3KP Sumatera I telah melakukan proses identifikasi risiko secara sistematis terhadap seluruh kegiatan utama yang dilaksanakan pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Proses identifikasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsi BP3KP Sumatera I, capaian kinerja tahun berjalan, hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya, serta potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, disusun sembilan (9) pernyataan profil risiko strategis dan operasional, serta tiga (3) pernyataan profil risiko korupsi yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja, baik dari aspek ketersediaan rumah layak huni, efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan, maupun kualitas pelayanan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Pernyataan risiko ini mencerminkan potensi risiko pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengendalian program, termasuk risiko yang bersumber dari faktor internal organisasi dan faktor eksternal.

Rincian pernyataan profil risiko dan profil risiko korupsi BP3KP Sumatera I disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3. 25. Rincian pernyataan profil risiko dan profil risiko korupsi BP3KP Sumatera I

No.	Kategori	Pernyataan Risiko
1.	Profil Risiko	Keterlambatan pengumpulan hasil verifikasi BSPS kepada Direktorat Rumah Swadaya
		Terlambatnya Penyelesaian Progres Fisik Terbangun (100%)
		Metode pelaksanaan pekerjaan dan material on-site tidak sesuai dengan RKS
		Proses revisi POK DIPA yang memakan waktu lama
		<i>Readiness Criteria</i> Usulan Program Rumah Susun dari Pemda/ Pihak pengusul tidak lengkap
		Kode BMN tidak sesuai dengan pencatatan pada Modul Komitmen di Aplikasi SAKTI
		Banyaknya Calon Penerima Bantuan (CPB) yang tidak sesuai kriteria BSPS
		Layanan tidak merata
		Masih sebagian kecil pegawai yang turut serta dalam penerapan ZI
2.	Profil Risiko Korupsi	Tim Verifikasi menerima tip/ hadiah untuk meloloskan usulan bantuan pembangunan perumahan
		Tim Verifikasi Usulan menerima tip/ hadiah untuk membantu pengusulan bantuan perumahan tanpa melalui prosedur yang berlaku
		Melakukan markup harga material dan spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan RAB dan SNI

Berdasarkan pernyataan risiko tersebut, diperoleh kategori dan sub kategori risiko sebagai berikut:

Tabel 3. 26. kategori dan sub kategori risiko

Kategori Risiko	Jumlah
Kinerja	2
Layanan	6
Kuangan	1
Sub Kategori Risiko	Jumlah
Suap Menyuap	2
Perbuatan Curang	1
Total	12



Berdasarkan kategori risiko yang ditetapkan, diperoleh data level risiko yang telah direspon setelah menggunakan inovasi pengendalian, sebagai berikut:

Tabel 3. 27. Data level risiko

Kategori Risiko	Level Risiko					Jumlah
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Kinerja	-	-	-	7	2	9
Layanan	-	-	-	15	8	23
Kuangan	-	-	-	-	3	3
total				22	13	35

Sebagai tindak lanjut dari penetapan risiko tersebut, BP3KP Sumatera I menyusun rencana inovasi pengendalian risiko yang bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko ke dalam batas risiko yang dapat diterima. Rencana inovasi pengendalian risiko ini mencakup langkah-langkah preventif dan korektif, penguatan mekanisme pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem pelaporan dan monitoring, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Rincian pernyataan risiko dan rencana inovasi pengendalian risiko yang diterapkan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 28. Pernyataan risiko dan rencana inovasi pengendalian risiko

No	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Inovasi Pengendalian	Respon Risiko
1	Terlambatnya Penyelesaian Progres Fisik Terbangun (100%)	Kinerja	1. Melakukan percepatan Dropping Material 2. Melakukan mediasi antara penerima bantuan dengan tokoh masyarakat setempat 3. Mendatangkan tukang dari kota/ kabupaten terdekat	Mengurangi dampak
2	Metode Pelaksanaan pekerjaan dan material on-site tidak sesuai dengan RKS		1. Penyepakatan penggunaan spesifikasi material, metode pelaksanaan, dan kurva S saat PCM 2. Penyedia jasa konstruksi wajib mengajukan approval material sebelum melaksanakan pemesanan/pembelian, serta mengajukan izin pelaksanaan pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan kepada konsultan MK	Mengurangi Dampak
3	Proses revisi POK DIPA	Kuangan	Berkoordinasi lebih awal dengan direktorat teknis selaku verifikator	Mengurangi Dampak,



	yang memakan waktu lama		sebelum revisi POK DIPA diajukan	Membagi Risiko
4	Keterlambatan pengumpulan hasil verifikasi BSPS kepada Direktorat Rumah Swadaya	Layanan	1. Memastikan TFL yang direkrut memiliki pengalaman sehingga lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan verifikasi 2. Melakukan pembekalan TFL dan pendampingan pelaksanaan verifikasi teknis	Mengurangi Kemungkinan, Mengurangi Dampak, Menghindari Risiko
5	Readiness Criteria Usulan Program Rumah Susun dari Pemda/ Pihak pengusul tidak lengkap		Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen usulan dan berkoordinasi dengan pengusul jika terdapat ketidaksesuaian	Mengurangi Kemungkinan, Mengurangi Dampak
6	Kode BMN tidak sesuai dengan pencatatan pada Modul Komitmen di Aplikasi SAKTI		Perbaikan pencatatan melalui reklasifikasi keluar dan masuk	Mengurangi Kemungkinan
7	Banyaknya Calon Penerima Bantuan (CPB) yang tidak sesuai kriteria BSPS		Berkoordinasi dengan pengusul dan Direktorat Teknis terkait	Mengurangi Dampak
8	Layanan tidak merata		1. Melakukan koordinasi pimpinan dengan Pemda terkait 2. Melakukan sosialisasi kepada Pemda terkait urgensi layanan Klinik PKP	Mengurangi Dampak
9	Masih sebagian kecil pegawai yang turut serta dalam penerapan ZI		Melakukan sosialisasi terkait Zona Integritas Melakukan rapat berkala	Mengurangi Kemungkinan

Penerapan Manajemen Risiko BP2P Sumatera I TA 2025 berjalan efektif sesuai ketentuan, didukung realisasi anggaran 99,81% serta tuntasnya penyusunan profil hingga evaluasi risiko berkala. Ke depan, penguatan budaya sadar risiko dan konsistensi antarunit kerja akan terus ditingkatkan.



3.3. Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 29. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

No.	Program / Kegiatan	Satuan	Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya				
			2021	2022	2023	2024	2025
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya hunian layak							
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera I							
	OUTPUT KEGIATAN						
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	-	-	-	-
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	-	-	-	-	2
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	-	-	-	-
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	-	-	-	-	1
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	1
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	-	-	-	-
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di BP3KP Sumatera I							



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I

OUTPUT KEGIATAN							
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	427	100	292	65	-
2	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	-	-	-
3	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-
5	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni							
OUTPUT KEGIATAN							
1	Jumlah unit rumah swadaya* <i>* Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan</i>	Unit	9.925	17.150	12.421	13.501	2.594
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun* <i>* Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan</i>	Unit	20	-	-	-	-
3	Jumlah rumah susun yang terbangun* <i>* Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan</i>	Unit	86	142	101	174	64
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	-	-	-	-
5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	-	-	-	-	2
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I

8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	2
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan							
OUTPUT KEGIATAN							
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh							
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu							
OUTPUT KEGIATAN							
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	-	-	-	-
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman							
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman							
OUTPUT KEGIATAN							
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	-	-	-	-
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel							
OUTPUT KEGIATAN							
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman							
OUTPUT KEGIATAN							
1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Sumatera I							
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I							



LAPORAN KINERJA

BP3KP SUMATERA I

SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I							
	OUTPUT KEGIATAN						
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	-	-	-	-
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-	-	-	-
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	-	-	-	-
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-	-	-	-
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	-	-	-	-
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-



3.3.2. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Tabel 3. 30. Capaian kinerja terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

No.	Program / Kegiatan	Satuan	Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi	
			Target	Realisasi
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya hunian layak				
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera I				
	OUTPUT KEGIATAN			
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	-
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	2	2
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	-
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	1
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	1	1
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	-
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di BP3KP Sumatera I				
	OUTPUT KEGIATAN			
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	-
2	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-
3	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	-
5	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni				
	OUTPUT KEGIATAN			
1	Jumlah unit rumah swadaya*	Unit	1.979	2.594



No.	Program / Kegiatan	Satuan	Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi	
			Target	Realisasi
	<i>* Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan</i>			
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun* <i>* Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan</i>	Unit	-	-
3	Jumlah rumah susun yang terbangun* <i>* Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan</i>	Unit	44	64
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	-
5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	2	2
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	-
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	2	2
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan				
	OUTPUT KEGIATAN			
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh				
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu				
	OUTPUT KEGIATAN			
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	-
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman				
	OUTPUT KEGIATAN			
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	-
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel				



No.	Program / Kegiatan	Satuan	Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi	
			Target	Realisasi
	OUTPUT KEGIATAN			
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
	OUTPUT KEGIATAN			
1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Sumatera I				
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I				
	OUTPUT KEGIATAN			
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	-
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	-
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	-
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

Analisis realisasi anggaran ini menyajikan tinjauan mendalam atas performa keuangan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera I yang mengelola 5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta pada Satuan Kerja (Satker) Provinsi Aceh yang mengampu 4 DIPA strategis. Evaluasi ini bertujuan untuk memotret sinkronisasi antara penyerapan pagu dengan capaian fisik di tengah tantangan pelaksanaan tahun anggaran 2025.



3.4.1. Realisasi Pelaksanaan Anggaran BP3KP Sumatera I

Hingga akhir periode Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember, Balai P3KP Sumatera I yang mengelola 5 DIPA dengan total pagu Rp 3.634.199.000,- berhasil mencatatkan realisasi keuangan sebesar Rp 3.563.047.677,- atau setara dengan 98,04%. Di sisi lain, capaian fisik pada layanan dukungan manajemen, pendataan program, serta pembangunan ZI dan manajemen risiko telah tuntas sepenuhnya (100%). Rincian penyerapan anggaran dari kelima DIPA tersebut disajikan secara komprehensif pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 31. Realisasi 31 Desember 2025 keseluruhan DIPA TA 2025

KODE SATUAN KERJA	UNIT ESELON I	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
691379	Sekretariat Jenderal	1.446.695.000,-	1.383.933.658,-	95,66 %
691433	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	510.940.000,-	509.820.453,-	99,78%
691487	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	321.853.000,-	320.652.244,-	99,63%
691541	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.051.245.000,-	1.045.863.398,-	99,49%
691595	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000,-	302.777.924,-	99,77%
Total Pagu (Rp)		3.634.199.000,-	3.563.047.677,-	98,04%

3.4.1.1. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA Sekretariat Jenderal

Realisasi keuangan DIPA Sekretariat Jenderal Balai P3KP Sumatera I (Satker 691379) per 31 Desember 2025 mencapai **95,66%** (Rp1.383.933.658,-). Capaian ini selaras dengan pemenuhan target fisik layanan dukungan manajemen operasional perkantoran yang telah terealisasi sebesar 100%. Detail penyerapan anggaran pada DIPA ini diuraikan dalam table berikut.

Tabel 3. 32. Realisasi 31 Desember 2025 DIPA Sekretariat Jenderal TA 2025

RO / KRO	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
7665.EBA.994.002.A	Keperluan Perkantoran	639.601.000 ,-	636.560.300 ,-	99,52 %



7665.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	86.400.000,-	60.165.058,-	69,64%
7665.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	184.550.000,-	184.428.300,-	99,93%
7665.EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	536.144.000,-	502.780.000,-	93,78%
Total Pagu (Rp)		1.446.695.000,-	1.383.933.658,-	95,66%

3.4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Unit kerja Balai P3KP Sumatera I melalui Satker 691433 telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pendataan Program Tiga Juta Rumah pada kawasan delineasi pesisir dan layanan Klinik PKP untuk tahun anggaran 2025. Hingga 31 Desember 2025, serapan anggaran tercatat sangat optimal di angka 99,78% dengan nilai nominal Rp509.820.453,-. Secara substansi, seluruh target fisik dan aspek pengawasan lapangan telah terpenuhi sepenuhnya (100%). Detail penyerapan anggaran untuk DIPA ini dapat dicermati pada table berikut:

Tabel 3. 33. Realisasi 31 Desember 2025 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA 2025

RO / KRO	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
7659.FAE.001.100.A	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	130.640.000 ,-	130.072.370 ,-	99,57 %
7659.FAE.003.100.A	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh	330.300.000 ,-	329.958.083 ,-	99,90 %
7659.PBF.001.100.A	Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000 ,-	49.790.000 ,-	99,58 %
Total Pagu (Rp)		510.940.000,-	509.820.453,-	99,78%

3.4.1.3. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Realisasi keuangan DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (Satker 691487) pada akhir tahun 2025 mencapai 99,63% (Rp320.652.244,-). Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan fisik Program Tiga Juta Rumah di wilayah perdesaan yang



telah mencapai 100%, termasuk pada aspek pengawasannya. Detail penyerapan anggaran pada DIPA ini terangkum dalam table berikut:

Tabel 3. 34. Realisasi 31 Desember 2025 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA 2025

RO / KRO	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
7660.AEA.001.100.A	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah	187.061.000 ,-	186.927.500 ,-	99,93 %
7660.FAE.005.100.A	Pemantauan dan Evaluasi BPS	134.792.000 ,-	133.724.921 ,-	99,21 %
Total Pagu (Rp)		321.853.000,-	320.652.244,-	99,63%

3.4.1.4. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Realisasi keuangan DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan pada Balai P3KP Sumatera I (Satker 691541) mencapai 99,49% (Rp1.045.863.398,-) pada penutupan tahun 2025. Performa keuangan tersebut selaras dengan tuntasnya capaian fisik program Pendataan Tiga Juta Rumah di wilayah perkotaan yang telah mencapai target 100%, termasuk pada aspek pengawasannya. Detail penyerapan anggaran pada DIPA ini terangkum dalam table berikut:

Tabel 3. 35. Realisasi 31 Desember 2025 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025

RO / KRO	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
7661.ABF.001.100.A	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	366.634.000 ,-	364.528.967 ,-	99,43 %
7661.ABF.004.100.A	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	171.235.000 ,-	169.876.394 ,-	99,21 %
7661.ABF.005.100.A	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	312.470.000 ,-	312.429.835 ,-	99,99 %



7661.FAE.001.100.A	Pelaksanaan Peman-tauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyeleng-garaan Perumahan Perkotaan	200.906.000 ,-	199.028.202 ,-	99,07 %
Total Pagu (Rp)		1.051.245.000,-	1.045.863.398,-	99,49%

3.4.1.5. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Hingga penutupan Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember, pelaksanaan ke-bijakan tata kelola, pengendalian risiko, dan akselerasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Satker 691595) telah terlaksana dengan sangat baik. Realisasi keuangan ter-catat sebesar Rp302.777.924,- atau mencapai 99,77%. Capaian ini selaras dengan realisasi fisik pembangunan ZI dan penerapan Manajemen Risiko yang telah tuntas sepenuhnya (100%), termasuk dalam fungsi pengawasannya. Rincian penyerapan anggaran pada DIPA ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 36. Realisasi 31 Desember 2025 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025

RO / KRO	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
7662.ABF.004.100.A	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sumatera I	129.233.000 ,-	128.869.278,-	99,72 %
7662.ABF.005.100.A	Penerapan Mana-jemen Risiko	174.233.000 ,-	173.908.646 ,-	99,81 %
Total Pagu (Rp)		303.466.000,-	302.777.924,-	99,77%

Meskipun terdapat tantangan eksternal (seperti kondisi hidrometeorologi yang memengaruhi aset di wilayah kerja), secara manajerial Balai tetap mampu memper-tahankan performa dukungan operasional dan pendataan program strategis nasional sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan.



3.4.2. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Satker PKP Prov. Aceh

Pada tahun 2025, realisasi anggaran Satker PKP Provinsi Aceh adalah Rp. 73,602,077,398 atau 99,28% dari total Pagu Rp. 74,132,692,000.

Tabel 3. 37. Realisasi Satker PKP Provinsi Aceh

UNIT ESELON I	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran (%)	Persentase Fisik (%)
Sekretariat Jenderal	660,859,000	652,693,786	98,76	
Direktorat Jenderal Kawas- an Permukiman	22,173,714,000	21,919,096,150	98.85	54,61
Direktorat Jenderal Pe- rumahan Perdesaan	22,748,555,000	22,661,228,900	99.62	
Direktorat Jenderal Pe- rumahan Perkotaan	28,549,564,000	28,369,058,562	99.37	
Total Pagu (Rp)	74,132,692,000	73,602,077,398	99.28	

Tingginya rata-rata penyerapan di atas **98%** pada seluruh unit kerja ini mencerminkan komitmen Satker PKP Provinsi Aceh dalam menjalankan program pembangunan perumahan dan permukiman secara efektif dan akuntabel. Capaian ini menjadi fondasi kuat bagi penyelesaian target-target fisik di lapangan, meskipun terdapat penyesuaian administratif akibat kondisi keadaan kahar pada beberapa paket pekerjaan. Detail perbandingan pagu dan realisasi anggaran tersebut tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 38. Detail Realisasi Satker PKP Provinsi Aceh

UNOR		PAGU	REALISASI			
			Keuangan		Fisik	Sisa
			Rp	%	%	Rp
SEKRETARIAT JEN- DERAL		660,859,000	652,693,786	98.76		8,165,214
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker PKP Provinsi Aceh	466,539,000	459,112,286	98.41		7,426,714
2	Honorarium	194,320,000	193,581,500	99.62		738,500
DIRJEN PERUMAHAN PERDESAAN		22,748,555,000	22,661,228,900	99.62		87,326,100



1	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	129,577,000	116,374,200	89.81	89.81	13,202,800
2	Pelaksanaan Peman-tauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	93,720,000	71,656,500	76.46	76.46	22,063,500
3	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Regular	20,960,000,000	20,960,000,000	00.00	39.81	-
4	Pengawasan Dan Pengendalian Rumah Swadaya	1,565,258,000	1,513,198,200	96.67	96.67	52,059,800
DIRJEN PERUMAHAN PERKOTAAN		28,549,564,000	28,369,058,562	99.37		180,505,438
1	Pembangunan Rumah Susun Pondok Pe-santren Yayasan Wakaf Quran Haroen Ali Kuta Malaka Dayah Darul Quran Aceh (DQA)	6,647,304,000	6,646,154,000	99.98		1,150,000
2	Pengadaan Meubelair Pembangunan Rumah Susun Pondok Pe-santren Yayasan Wakaf Quran Haroen Ali Kuta Malaka Dayah Darul Quran Aceh (DQA)	744,570,000.00	733,350,424	98.49		11,219,576
3	Pembangunan Rumah Susun Pondok Pe-santren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima	6,667,984,000	6,646,530,000	99.68		21,454,000
4	Pengadaan Meubelair Pembangunan Rumah Susun Pondok Pe-santren Dayah Teungku Chiek Pante Geulima	779,040,000	769,930,181	98.83		9,109,819
5	Manajemen Kon-struksi Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Yayasan Wakaf Quran Haroen Ali Kuta Malaka Dayah Darul Quran Aceh (DQA)	397,620,000	394,806,000	99.29		2,814,000
6	Manajemen Kon-struksi Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Dayah	398,560,000	391,041,157	98.11		7,518,843



	Teungku Chiek Pante Geulima					
7	Pengawasan Pengendalian	459,660,000	435,445,241	94.73	94.73	24,214,759
8	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	500,353,000	417,724,900	83.49	83.49	82,628,100
9	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	11,060,000,000	11,060,000,000	100.00	40.67	-
10	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	894,473,000	874,076,659	97.72	97.72	20,396,341
DIRJEN KAWASAN PERMUKIMAN		22,173,714,000	21,919,096,150	98.85	54.61	254,617,850
1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	117,745,000	105,425,350	89.54	89.54	12,319,650
2	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	20,020,000,000	20,020,000,000	100.00	40.80	-
3	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Swadaya	2,035,969,000	1,793,670,800	88.10	88.10	242,298,200
Satker Prov Aceh		74,132,692,000	73,602,077,398	99.28		530,614,602

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran Satker PKP Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025 dinyatakan Sangat Berhasil. Satker telah mampu menyeimbangkan antara target serapan anggaran yang tinggi dengan kepatuhan terhadap regulasi administratif, meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi alam di penghujung tahun.

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Balai P3KP Sumatera I dan Satker PKP Provinsi Aceh difokuskan pada prinsip *value for money*, yakni pencapaian target fisik 100% di tengah realisasi anggaran yang sangat optimal. Dengan serapan rata-rata di atas 98% hingga 99%, efisiensi tercermin dari kemampuan unit kerja dalam menekan sisa anggaran tanpa mengurangi kualitas luaran (output) program. Penggunaan sumber daya diarahkan secara selektif pada kegiatan prioritas, seperti



pendataan Program Tiga Juta Rumah dan pembangunan infrastruktur perumahan, sehingga alokasi dana yang tersedia mampu memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat di Provinsi Aceh.

Tabel 3. 39. Efisiensi BP3KP Sumatera I

UNIT ESELON I	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	EFISIENSI	
			Persentase	Sisa
Sekretariat Jenderal	1.446.695.000,-	1.383.933.658,-	95,66 %	62.761.342
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	510.940.000,-	509.820.453,-	99,78%	1.119.547
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	321.853.000,-	320.652.244,-	99,63%	1.200.756
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.051.245.000,-	1.045.863.398,-	99,49%	5.381.602
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000,-	302.777.924,-	99,77%	688.076
Total Pagu (Rp)	3.634.199.000,-	3.563.047.677,-	98,04%	71.151.323

Tabel 3. 40. Efisiensi Satker PKP Prov Aceh

UNOR	PAGU	REALISASI	EFISIENSI	
		Keuangan		Sisa
		Rp	%	Rp
SEKRETARIAT JENDERAL	660,859,000	652,693,786	98.76	8,165,214
DIRJEN PERUMAHAN PERDESAAN	22,748,555,000	22,661,228,900	99.62	87,326,100
DIRJEN PERUMAHAN PERKOTAAN	28,549,564,000	28,369,058,562	99.37	180,505,438
DIRJEN KAWASAN PERMUKIMAN	22,173,714,000	21,919,096,150	98.85	254,617,850
Satker Prov Aceh	74,132,692,000	73,602,077,398	99.28	530,614,602

Berdasarkan analisis realisasi dan efisiensi anggaran pada seluruh unit kerja, dapat ditarik kesimpulan strategis sebagai berikut:

1. Performa Serapan Anggaran yang Sangat Tinggi

Secara kolektif, baik pada level Balai maupun Satker, persentase penyerapan anggaran menunjukkan angka yang sangat memuaskan di atas target nasional:



- a) Balai P3KP Sumatera I (5 DIPA): Berhasil merealisasikan anggaran sebesar 98,04% (Rp3,56 Miliar).
- b) Satker PKP Provinsi Aceh (4 DIPA): Mencapai realisasi yang lebih masif sebesar 99,28% (Rp73,6 Miliar). Tingginya angka serapan ini membuktikan bahwa koordinasi perencanaan dan eksekusi anggaran antara fungsi manajerial di Balai dan fungsi teknis di Satker berjalan sangat sinkron.

2. Efektivitas Penggunaan Sumber Daya (Value for Money)

Kedua unit kerja menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran yang luar biasa:

- a) Pada DIPA Balai, seluruh target fisik seperti Pendataan Program Tiga Juta Rumah dan Manajemen Risiko tercapai 100% meskipun menyisakan dana efisiensi yang sangat minim (hanya Rp71,1 Juta).
- b) Pada DIPA Satker, serapan yang hampir menyentuh angka 100% (99,28%) mencerminkan bahwa alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur perumahan telah digunakan secara maksimal sesuai peruntukannya.

3. Akuntabilitas di Tengah Keadaan Kahar

Meskipun realisasi keuangan pada Satker PKP Provinsi Aceh mencapai angka optimal, aspek akuntabilitas tetap dipertahankan melalui kebijakan koreksi prestasi pekerjaan. Penyesuaian bobot realisasi fisik (akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025) yang diikuti dengan rekonsiliasi data anggaran membuktikan bahwa penyerapan dana tetap mengedepankan kepatuhan terhadap hasil revidi aparat pengawas (APIP) dan kondisi faktual di lapangan.

4. Ketahanan dan Komitmen Pembangunan Zona Integritas

Keselarasan antara serapan anggaran Sekretariat (dukungan manajemen) dan DIPA Tata Kelola menunjukkan bahwa penguatan internal organisasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) mendukung kelancaran pelaksanaan proyek-proyek fisik. Hal ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh Balai dan Satker telah melalui sistem pengendalian risiko yang ketat untuk mencegah inefisiensi.



Pernyataan Penutup: Secara agregat, pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Balai P3KP Sumatera I dan Satker PKP Provinsi Aceh dikategorikan Sangat Berhasil. Unit kerja mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan penyerapan dana dan kualitas capaian fisik, serta tetap responsif dan akuntabel dalam menghadapi kendala keadaan kahar di wilayah Provinsi Aceh.

3.6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

Analisis terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan fisik pada Balai P3KP Sumatera I serta Satker PKP Provinsi Aceh menunjukkan adanya sejumlah faktor internal dan eksternal yang memengaruhi capaian kinerja Tahun Anggaran 2025.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa elemen kunci yang mendorong tercapainya realisasi anggaran yang sangat optimal (98,04% pada Balai dan 99,28% pada Satker) antara lain:

- a) Koordinasi Inter-Unit yang Solid: Sinergi yang kuat antara 5 DIPA di level Balai dan 4 DIPA di level Satker memungkinkan proses pendataan program strategis dan pembangunan fisik berjalan beriringan tanpa tumpang tindih regulasi.
- b) Komitmen pada Tata Kelola dan Manajemen Risiko: Kedisiplinan dalam menerapkan ISO 31000 dan pembangunan Zona Integritas (ZI) membantu organisasi dalam mengidentifikasi hambatan sejak dini, sehingga penyerapan anggaran tetap terjaga dalam koridor akuntabilitas.
- c) Perencanaan Anggaran yang Presisi: Akurasi dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) memastikan ketersediaan anggaran selalu selaras dengan kebutuhan progres fisik di lapangan, yang dibuktikan dengan sisa anggaran (SiLPA) yang sangat minim.
- d) Pemanfaatan Teknologi Informasi: Penggunaan sistem pelaporan digital dan pemantauan dasbor progres membantu pengambilan keputusan yang cepat oleh pimpinan (Kabalai/Kasatker) dalam merespons kendala teknis.

2. Faktor Penyebab Kegagalan / Kendala Pelaksanaan



Meskipun secara administratif capaian menunjukkan angka yang sangat baik, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi performa fisik dan mengharuskan dilakukannya penyesuaian:

- a) Kondisi Keadaan Kahar (Force Majeure): Terjadinya bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 di Provinsi Aceh menjadi faktor eksternal utama yang menghambat penyelesaian akhir beberapa paket pekerjaan fisik. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan pada aset yang hampir rampung (seperti pada Rusun Ponpes Dayah Teungku Chiek Pante Geulima).
- b) Koreksi Prestasi Pekerjaan: Adanya bencana tersebut mengharuskan dilakukannya reviu teknis ulang oleh Inspektorat Jenderal. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan bobot realisasi fisik secara administratif (koreksi dari 99,60% ke 91,71%) guna menyesuaikan dengan kondisi faktual pascabencana.
- c) Ketergantungan pada Kondisi Geografis: Lokasi proyek yang tersebar di wilayah delineasi pesisir, perdesaan, dan perkotaan memiliki tantangan aksesibilitas yang berbeda, terutama saat cuaca ekstrem melanda wilayah Aceh, yang sempat menghambat mobilisasi personel pengawas lapangan.

Secara keseluruhan, faktor pendukung keberhasilan masih jauh lebih dominan dibandingkan kendala yang ada. Penurunan progres fisik pada beberapa titik tidak dikategorikan sebagai kegagalan manajerial, melainkan dampak dari fenomena alam yang telah dimitigasi melalui mekanisme administratif "Keadaan Kahar" yang akuntabel dan transparan.



BAB 4

PENUTUP

- Kesimpulan
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut

2025



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja tahun 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan yang Sangat Optimal: Pelaksanaan anggaran pada Balai P3KP Sumatera I (5 DIPA) dan Satker PKP Provinsi Aceh (4 DIPA) menunjukkan performa yang sangat memuaskan. Balai mencatatkan realisasi sebesar 98,04%, sementara Satker mencapai 99,28%. Hal ini menunjukkan efektivitas manajemen keuangan dan ketepatan rencana penarikan dana (RPD) yang disusun.
2. Ketuntasan Target Fisik dan Manajerial: Seluruh target *output* pada DIPA manajerial, pendataan Program Tiga Juta Rumah, serta pembangunan Zona Integritas dan penerapan Manajemen Risiko berhasil diselesaikan dengan capaian fisik 100%.
3. Akuntabilitas dalam Kondisi Kahar: Terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025 telah ditangani secara akuntabel. Meskipun terjadi koreksi progres fisik (seperti pada Rusun Ponpes Dayah Teungku Chiek Pante Geulima dari 99,60% menjadi 91,71%), langkah ini diambil berdasarkan reviu Inspektorat Jenderal untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan tetap didasarkan pada kondisi faktual di lapangan.
4. Efisiensi Sumber Daya: Penggunaan anggaran telah memenuhi prinsip *Value for Money*, di mana target fisik yang masif dapat dicapai dengan sisa anggaran yang sangat minim (SiLPA terkendali), menunjukkan adanya efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan dan output kerja.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sebagai langkah strategis untuk keberlanjutan program dan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya, disusun rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Percepatan Penanganan Aset Terdampak Bencana: Segera melakukan tindak lanjut fisik terhadap aset yang terdampak keadaan kahar melalui mekanisme



yang diatur dalam kontrak *Multi Years Contract* (MYC) atau anggaran pemeliharaan, guna memastikan aset tersebut dapat segera difungsikan dan diserahterimakan.

2. Penguatan Mitigasi Risiko Konstruksi: Mengingat tingginya potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Aceh, direkomendasikan agar perencanaan konstruksi ke depan lebih mengintegrasikan aspek ketahanan bencana dan mempercepat jadwal pelaksanaan fisik (*curva-S*) pada periode cuaca yang lebih stabil.
3. Peningkatan Frekuensi Monitoring Lapangan: Melakukan pemantauan rutin secara lebih intensif menjelang akhir tahun anggaran untuk mendeteksi dini kendala alam maupun teknis, sehingga penyesuaian administratif (seperti addendum atau pernyataan keadaan kahar) dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
4. Optimalisasi Pendataan Berbasis Spasial: Melanjutkan keberhasilan pendataan Program Tiga Juta Rumah dengan mengintegrasikan hasil delineasi kawasan (pesisir, perdesaan, perkotaan) ke dalam sistem basis data terpadu, agar dapat menjadi acuan valid bagi perencanaan pembangunan perumahan di tahun berikutnya.
5. Pemeliharaan Status Zona Integritas: Mempertahankan komitmen penerapan Manajemen Risiko ISO 31000 dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagai budaya kerja untuk menjaga tren positif serapan anggaran yang transparan dan bebas dari inefisiensi.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB:

Iswanto, S.T., M.Si.

PENGARAH:

Asnah Rumiawati, S.T., M.Si.

PENYUSUN:

Chairina Ulfa, S.T.

Muhammad Rizwan Anfa, S.Kom.

EDITOR:

Chairina Ulfa, S.T.

Muhammad Rizwan Anfa, S.Kom.





KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I



bp3kp.sumatera1@pkp.go.id



[bp3kp_sumatera1](https://www.instagram.com/bp3kp_sumatera1)



Jl. Jend. Sudirman No.32, Lamteumen Timur, Banda Aceh